

**PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN RASIO PAJAK  
(*TAX RATIO*) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
(STUDI KASUS DI NEGARA – NEGARA ASEAN)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**FINIDYA DEMARANI**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF GOVERNMENT GOVERNANCE AND *TAX RATIO* TO ECONOMIC GROWTH (CASE STUDY IN ASEAN COUNTRIES)**

**By**

**Finidya Demarani**

*Good government governance and tax ratio can affect economic growth in a country. The good performance of the country's economy, indicated by the high rate of economic growth. The purpose of this study is to convince and prove if tax ratio, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and corruption control as a set of good governance affect in economic growth, using data from 6 countries in ASEAN.*

***Keywords:*** *Economic growth, Government governance, Tax ratio*

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN RASIO PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI KASUS DI NEGARA- NEGARA ASEAN)**

**Oleh**

**Finidya Demarani**

*Tata kelola pemerintahan yang baik dan rasio pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kinerja perekonomian negara yang baik, ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk meyakinkan dan membuktikan apakah rasio pajak, efektifitas pemerintah, kualitas peraturan, rule of law dan pengendalian korupsi sebagai seperangkat tata kelola pemerintahan yang baik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan data dari 6 negara di ASEAN.*

**Keywords:** *Pertumbuhan ekonomi, Rasio pajak, Tata kelola pemerintahan*

**PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN RASIO PAJAK  
(*TAX RATIO*) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
(STUDI KASUS DI NEGARA – NEGARA ASEAN)**

**Oleh**

**FINIDYA DEMARANI**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER SAINS**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Tesis : **PENGARUH TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN DAN RASIO PAJAK (*TAX  
RATIO*) TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI (STUDI KASUS DI NEGARA-  
NEGARA ASEAN)**

Nama Mahasiswa : *Finidya Demarani*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1521021007

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Program Studi : Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

**MENYETUJUI**  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



**Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**  
NIP. 19670710 199003 2001

Pembimbing II



**Dr. Arivina Rathih Taher, S.E., M.M.**  
NIP. 19800705 200604 2002

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung  
Ketua Program Studi





**Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.**  
NIP. 19611209 198803 1003

**MENGESAHKAN**



**1. Komisi Penguji**

**1.1 Ketua Komisi Penguji: Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**  
(Pembimbing I)

  
.....  
  
.....

**1.2 Anggota Komisi Penguji: Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.**  
(Penguji I)

**1.3 Anggota Komisi Penguji: Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.E.**  
(Penguji II)

  
.....  
  
.....

**1.4 Sekretaris Komisi Penguji: Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M.**  
(Pembimbing II)

**2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**

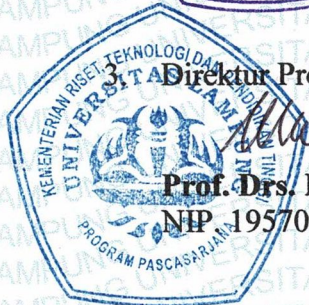
Dekan



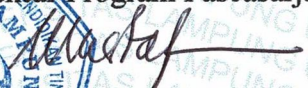
**Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP. 19610904 198703 1011



Direktur Program Pascasarjana



**Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19570101 198403 1020



**Tanggal Lulus Ujian Tesis: 11 April 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Rasio Pajak (*Tax Ratio*) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Negara-Negara ASEAN)”** adalah karya Saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya Penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiatisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran Saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan. Saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 April 2018

Pembuat Pernyataan,



**Finidya Demarani**  
**NPM. 1521021007**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 5 Mei 1990, sebagai anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Rudy Priajaya, SE, M.IP dan Ibu Sri Ayu Rafida, SE, MM.

Penulis memulai Pendidikannya di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Bandar Lampung diselesaikan tahun 1996, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rawa Laut (Teladan) Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002. Selanjutnya, penulis meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2005, dan selanjutnya pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008. Pada tahun 2008, penulis diterima menjadi mahasiswi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Kemampuan Akademik dan Bakat (PKAB) yang diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2015, penulis diterima menjadi Mahasiswi Jurusan Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.



## **MOTTO**

Sebagai manusia, sebaiknya kita berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang kita lakukan di dunia ini dan berbuat baik untuk sesama. Hanya Allah SWT yang menentukan semua hasilnya baik atau buruknya bagi kita.

**(Finidya Demarani)**

Kupersembahkan karya ku kepada orang-orang yang kucintai :

Mama dan Papa tercinta, yang telah memberikan motivasi terbesar dalam hidupku, yang telah mengiringiku dengan doa dalam setiap hembusan nafas dan ayunan langkahku.

Adik- adikku tersayang, serta keluarga besarku yang selalu memberiku semangat.

Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku kelak.

Sahabat-sahabatku tersayang, yang telah memberikan warna-warni dalam hidupku dan selalu ada pada saat susah maupun senang.

Almamater tercinta...

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tesis yang berjudul “Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Rasio Pajak (*Tax Ratio*) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Negara-Negara ASEAN)” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Jurusan Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Dr. Marselina, S.E., M. P. M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan arahan, saran, nasehat, dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M. M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan arahan, saran, nasehat, dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
3. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;

4. Ibu Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M. E., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
6. Seluruh dosen Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah memberikan didikan dan ilmu yang bermanfaat;
7. Segenap staf administrasi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sella, Suri, Mbak Wanti, dan Mas Bolang atas bantuannya;
8. Kedua orang tuaku, Papa (Rudy Priajaya) dan Mama (Sri Ayu Rafida) terima kasih atas perlindungan, kasih sayang, cinta, dan dukungan serta pengorbanan yang selalu diberikan dengan tulus kepada anak-anaknya;
9. Adikku tersayang M. Gilang Dwandaru, Firianda Dzakiya, dan M. Gifary Dharmayandaru. Terima kasih atas doa, bantuan dan dukungan kalian;
10. Eyang Radjimin Djamil dan Nenek Emma Hosi atas doa dan dukungannya untuk dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Datuk Alhusniduki Hamim (alm) dan Nyaik Dewi Sriyati (almh), semoga Datuk dan Nyaik dapat melihat saya dari surga Allah SWT;
12. Seseorang yang selalu menemaniku baik suka maupun duka, yang tak henti-hentinya memberikan bantuan, dukungan serta semangat kepadaku;
13. Teman-teman di Magister Ilmu Ekonomi 2015 Mba Mayra, Mba Desita, Mba Reniza, Mba Dwi, Mba Cici, Gista, Tasha, Cia, Ivo, Om Senna, Bang Ferry, Aldi yang dari awal perkuliahan selalu saling mendukung satu sama lain dan tetap selalu kompak. Terimakasih atas momen-momen suka duka bersama

kalian selama ini serta bantuan dan dukungan dari kalian. Terkhusus Mba Mayra & Mba Reniza yang di akhir menyelesaikan tesis selalu memberikan pencerahan dan semangat di saat penulis mulai tidak semangat dan pikiran lagi tidak fokus;

14. Teman-teman di WWIP Amel, Gista, Nice, Novi, dan Tika yang senantiasa mendengarkan keluh kesahku dan memberikan semangat kepadaku. Terimakasih atas momen-momen suka duka bersama selama ini serta bantuan dan dukungan dari kalian.

Setiap karya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Segala kelebihan dan manfaat yang bisa diambil merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan segenap pengajar, dan segala kelemahan dalam karya ini merupakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Bandar Lampung, 11 April 2018

Penulis

**Finidya Demarani**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Manfaat Penelitian .....	18
E. Sistematika Penulisan .....	18
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Tinjauan Teoritis .....	20
2.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	20
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	23
1. Teori Keynes .....	23
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi <i>Endogenous</i> .....	25
2.2 Rasio Pajak ( <i>Tax Ratio</i> ) .....	27
2.3 Tata Kelola Pemerintahan .....	29
2.4 Indeks Tata Kelola Pemerintahan ( <i>World Governance Index/WGI</i> ) .....	33
2.5 Indikator Tata Kelola Dunia ( <i>Worldwide Governance Indicators/WGI</i> ) .....	35
2.5.1 <i>Government Effectiveness</i> .....	36
2.5.2 <i>Regulatory Quality</i> .....	39
2.5.3 <i>Rule of Law</i> .....	42
2.5.4 <i>Control of Corruption</i> .....	45
B. Tinjauan Empiris .....	48
C. Kerangka Pemikiran .....	51
D. Hipotesis .....	51

<b>III. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Jenis dan Sumber Data .....	53
B. Definisi Operasional Variabel .....	53
1. Pertumbuhan Ekonomi .....	53
2. Rasio Pajak ( <i>Tax Ratio</i> ) .....	54
3. Indikator Tata Kelola Pemerintahan .....	54
C. Model Penelitian .....	55
D. Uji Asumsi Klasik .....	56
1. Normalitas .....	56
2. Multikolinearitas .....	56
3. Heteroskedastisitas .....	57
4. Autokorelasi .....	58
E. Metode Analisis Data Panel .....	59
1. Metode <i>Pooled Least Square</i> (PLS) .....	60
2. Metode <i>Fixed Effect</i> (FEM) .....	60
3. Metode <i>Random Effect</i> (REM) .....	61
F. Metode Pemilihan Model (Uji Kesesuaian Model) .....	61
1. Uji Chow .....	61
2. Uji Hausman .....	62
G. Uji Kriteria Statistik .....	63
1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	63
2. Uji F-statistik .....	63
3. Uji t-statistik .....	64
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Hasil .....	66
4.1 Uji Asumsi Klasik .....	66
4.2 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel .....	67
4.2.1 Uji Chow .....	68
4.2.2 Uji Hausman .....	68
4.3 Uji Kriteria Statistik .....	71
4.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	71
4.4.2 Uji F-statistik .....	72
4.4.3 Uji t-statistik .....	72
B. Pembahasan.....	73
1. Pengaruh <i>Tax Ratio</i> dengan Pertumbuhan Ekonomi .....	73
2. Pengaruh <i>Government Effectiveness</i> dengan Pertumbuhan Ekonomi .....	75
3. Pengaruh <i>Regulatory Quality</i> dengan Pertumbuhan Ekonomi .....	78
4. Pengaruh <i>Rule of Law</i> dengan Pertumbuhan Ekonomi .....	79

5. Pengaruh <i>Control of Corruption</i> dengan Pertumbuhan Ekonomi .....	81
6. Interpretasi Metode <i>Individual Fixed Effect</i> .....	82
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
A. Simpulan .....	86
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>



## DAFTAR TABEL

### Halaman

#### Tabel

1. Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Tahun 2006-2015 (dalam persen).....	3
2. <i>Tax Ratio</i> di 6 Negara ASEAN tahun 2006-2015 (dalam persen) .....	5
3. Indeks <i>Government Effectiveness</i> di 6 Negara ASEAN tahun 2006-2015...	8
4. Indeks <i>Regulatory Quality</i> di 6 Negara ASEAN tahun 2006-2015 .....	10
5. Indeks <i>Rule of Law</i> di 6 Negara ASEAN tahun 2006-2015 .....	13
6. Indeks <i>Control of Corruption</i> di 6 Negara ASEAN tahun 2006-2015 .....	15
7. Faktor-faktor yang membentuk <i>World Governance Index</i> .....	34
8. Nilai Durbin-Watson .....	58
9. Uji Chow .....	68
10. Uji Hausman .....	69
11. Hasil Uji Regresi Dengan Pendekatan <i>Fixed Effect</i> .....	70
12. Hasil Uji F-statistik .....	72
13. Hasil Uji t-statistik .....	72
14. Interpretasi Metode <i>Individual Fixed Effect</i> .....	83

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

#### Gambar

1. Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Tax Ratio</i> .....	5
2. Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Government Effectiveness</i> .....	9
3. Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Regulatory Quality</i> .....	11
4. Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Rule of Law</i> .....	14
5. Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Control of Corruption</i> .....	16
6. Kerangka Pemikiran.....	51
7. Uji Normalitas.....	93

## DAFTAR LAMPIRAN

### Halaman

#### Lampiran

1. Data Regresi .....	91
2. Uji Normalitas .....	93
3. Uji Multikolinearitas .....	93
4. Uji Heteroskedastisitas .....	94
5. Uji Autokorelasi .....	94
6. Hasil Uji Chow .....	95
7. Hasil Uji Hausman .....	95
8. Hasil Uji Regresi Dengan Pendekatan <i>Fixed Effect</i> .....	96
9. Hasil Uji F-statistik .....	97
10. Hasil Uji t-statistik .....	97
11. Interpretasi Metode <i>Individual Fixed Effect</i> .....	97

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu indikator mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya terhadap barang dan jasa. Kinerja perekonomian negara ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Menurut Kuznet dalam Jhingan (2012), pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya: kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Kinerja perekonomian negara yang baik, salah satunya ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut Kartika Dewi dkk (2015), pertumbuhan ekonomi selama ini baru dianalisis dari faktor-faktor ekonomi semata seperti pajak, FDI (*Foreign Direct Investment*), investasi, inflasi, suku bunga. Salah satu faktor yang sifatnya kuantitatif dan belum banyak diteliti adalah dari sisi tata kelola pemerintahan. Penelitian bidang ini menjadi menarik karena ternyata dengan tata kelola pemerintahan yang baik memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang efisien (Widodo, 2014). Upaya mewujudkan ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan dilakukan

upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2013).

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* pertama diusulkan oleh *World Bank*, *UNDP* dan *Asian Development Bank* (ADB), kemudian dikembangkan oleh banyak pakar di negara-negara berkembang guna mewujudkan gagasan-gagasan menyangkut tata pemerintahan. Mengacu pada laporan *World Bank* yang ditulis oleh Kaufman, Kraay dan Lobatón (2009), terdapat hubungan langsung antara *good governance*, *stable government*, dan sosial ekonomi yang lebih baik bahkan *good governance* dijadikan aspek pertimbangan lembaga donor dalam memberikan pinjaman maupun hibah (Arifiyadi, <http://www.depkominfo.go.id>), bahkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Tata kelola pemerintahan yang dikeluarkan oleh *World Bank* berupa angka indeks antara -2,5 sampai dengan 2,5 dimana angka -2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terbaik. Semakin tinggi angka indeks maka tata kelola pemerintahan termasuk baik, sebaliknya semakin rendah angka indeks maka tata kelola pemerintahan yang di wakili oleh *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption* semakin buruk.

Konsep tata kelola pemerintahan yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi akan menjadi bahasan menarik, jika dilihat pada kawasan yang memiliki keterlibatan kerjasama. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang terletak di Asia Tenggara dipilih menjadi objek penelitian, menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) pada tahun 2006 – 2015 adalah periode terbaik pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Kondisi ini memacu antusias negara Eropa dan China terhadap negara-negara ASEAN untuk berinvestasi lebih banyak di kawasan ASEAN.

ASEAN memiliki 11 negara anggota yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Berikut ini perkembangan pertumbuhan ekonomi di negara – negara ASEAN.

**Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Tahun 2006-2015 (dalam persen)**

NO.	NEGARA	TAHUN										RATA-RATA
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	BRUNEI D	4,4	0,16	-1,94	-1,7965	2,6	3,75	0,91	-2,126	-2,35	-0,567	0,304
2	FILIPINA	5,24	6,62	4,15	1,15	7,63	3,66	6,68	7,06	6,15	6,07	5,441
3	INDONESIA	5,5	6,35	6,01	4,63	6,22	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,636
4	KAMBOJA	10,77	10,23	6,69	0,09	5,96	7,07	7,31	7,43	7,07	7,04	6,966
5	LAOS	8,62	7,6	7,83	7,5	8,53	8,04	8,03	8,03	7,61	7,27	7,906
6	MALAYSIA	5,59	9,43	3,32	-2,526	6,98	5,29	5,47	4,69	6,01	4,97	4,922
7	MYANMAR	13,08	11,99	10,26	10,55	9,63	5,59	7,33	8,43	7,99	7,29	9,214
8	SINGAPURA	8,86	9,11	1,79	-0,603	15,24	6,22	3,87	5	3,57	1,93	5,498
9	THAILAND	4,97	5,44	1,73	-0,691	7,51	0,84	7,24	2,73	0,92	2,94	3,362
10	TIMOR LESTE	-5,714	11,45	14,2	12,96	10,42	8,06	5,79	2,88	5,86	4,3	7,020
11	VIETNAM	6,98	7,3	5,66	5,4	6,42	6,24	5,25	5,42	5,98	6,68	6,133

Sumber: *World Bank* 2017, diolah

Tabel 1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di 11 negara ASEAN yang berfluktuatif dari 2006-2015. Dapat dilihat bahwa dari rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN selama 10 tahun, Brunei Darussalam memiliki pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 0,304%, sedangkan Myanmar memiliki

pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 9,214%. Namun dari 11 negara ASEAN, hanya ada 6 negara ASEAN yang memiliki kelengkapan data dari tahun 2006 hingga tahun 2015 yaitu Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Thailand sehingga dalam penelitian sebagai sampel data ada 6 negara ASEAN.

Anggota ASEAN semuanya menggunakan sistem perpajakan progresif dimana individu dikenai pajak sesuai dengan jumlah yang mereka dapatkan. Hal ini menyebabkan individu dengan gaji lebih tinggi dikenai pajak dengan tarif lebih tinggi dari pada mereka yang memiliki tingkat yang lebih rendah (Shira, 2016). Menurut Gale dan Andrew (2016) tidak semua penerimaan pajak memiliki dampak yang sama pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Reformasi yang memperbaiki insentif, mengurangi subsidi distorsi yang ada, hindari keuntungan *windfall*, dan menghindari defisit pembiayaan akan memiliki efek yang lebih baik pada jangka panjang ukuran ekonomi, tapi mungkin juga menciptakan *trade-off* antara ekuitas dan efisiensi. Menurut Huang dan Frenz (2014) kenaikan tarif pajak dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi sehingga pajak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu, semakin besar *tax ratio* maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.

Berikut ini disajikan perkembangan penerimaan pajak di enam negara ASEAN yang diwakili oleh *tax ratio*:

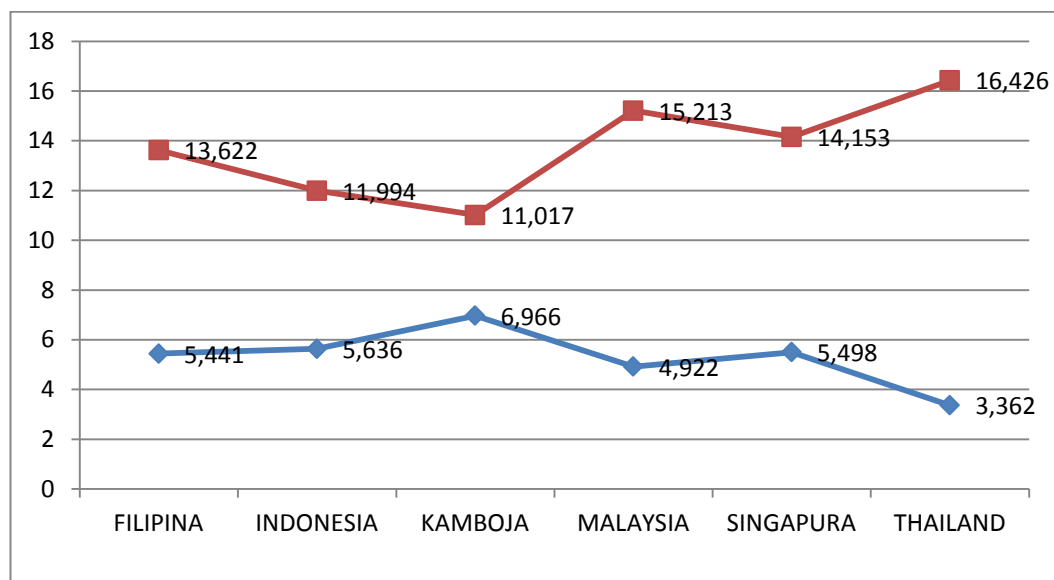
**Tabel 2. Tax Ratio di Enam Negara ASEAN tahun 2006-2015 (dalam persen)**

NO	NEGARA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
1	FILIPINA	13,71	13,53	13,7	12,22	12,93	13,21	14,06	14,47	14,77	13,62	13,622
2	INDONESIA	12,26	12,43	13,30	11,06	11,23	12,08	12,47	12,4	11,97	10,74	11,994
3	KAMBOJA	8,17	9,69	10,55	9,64	10	10,15	11,08	11,97	14,76	14,16	11,017
4	MALAYSIA	14,51	14,3	20,22	14,94	13,33	14,79	15,61	15,31	14,83	14,29	15,213
5	SINGAPURA	11,89	12,88	22,5	13,07	12,98	13,3	13,83	13,52	13,93	13,63	14,153
6	THAILAND	15,63	15,14	17,3	14,19	15,39	17,63	16,83	18,69	17,18	16,28	16,426

Sumber: *World Bank* 2017, diolah

Tabel 2 menunjukkan rata-rata *tax ratio* di enam negara ASEAN fluktuatif dari 2006-2015. Dapat dilihat bahwa dari rata-rata *tax ratio* di 6 negara ASEAN, Kamboja memiliki *tax ratio* terendah yaitu sebesar 11,017% sedangkan Thailand memiliki *tax ratio* tertinggi sebesar 16,426%.

Menurut Amelia (2014) ada hubungan positif antara *tax ratio* dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat hubungan antara *tax ratio* dan pertumbuhan ekonomi ASEAN, maka dapat dilihat dari Gambar 1 di bawah ini:



**Gambar 1. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan Tax Ratio di Enam Negara ASEAN**



Gambar 1 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN belum dapat meningkatkan *tax ratio* di enam negara ASEAN, karena negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi ternyata *tax ratio* rendah. Sedangkan negara yang pertumbuhan ekonominya rendah, memiliki *tax ratio* yang tinggi. Hal ini disebabkan tingginya *tax ratio* maka dapat membebankan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonominya rendah.

*Tax ratio* Kamboja terendah di enam negara ASEAN dengan nilai rata-rata sebesar 11,017% dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 6,966% menunjukkan bahwa Kamboja memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah, sehingga antara *tax ratio* dan pertumbuhan ekonominya tidak sesuai karena *tax ratio* yang di bebaskan oleh pemerintah kepada masyarakat sangat tinggi. Oleh karena itu, masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Sedangkan *tax ratio* terbesar yaitu Thailand dengan nilai rata-rata sebesar 16,426% dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 3,362%, dimana pertumbuhan ekonomi Thailand terbesar di 6 negara ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa *tax ratio* dan pertumbuhan ekonomi Thailand tidak sesuai karena besarnya *tax ratio* yang di bebaskan kepada masyarakat di Thailand sangat tinggi, tetapi masyarakatnya masih mempunyai rasa kesadaran yang tinggi dan rasa kepatuhan atas perintah kerajaan untuk membayar pajak. Maka tingkat rata-rata *tax ratio* Thailand lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Selain pajak, pertumbuhan ekonomi juga bisa dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan, pentingnya pemerintahan yang baik dalam pertumbuhan ekonomi, bahkan tata pemerintahan yang baik dimasukkan sebagai salah satu tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs). Healey dan Robinson dalam Azeez (2009) menyatakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah efektivitas organisasi tingkat tinggi dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan dan kebijakan yang benar-benar dijalankan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan, stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian menurut Basu dalam Pradhan dan Sanyal (2011), *good governance* adalah kemampuan untuk menyediakan layanan sosial untuk membangun *human capital*, menyediakan infrastruktur fisik, ekonomi atau manajemen dalam kerangka pemerintahan sehingga tercapai kesejahteraan.

Rafayet dkk (2017) menyatakan *government effectiveness* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Peningkatan pada kualitas pelayanan publik dan implementasi kebijakan di suatu negara maka hal tersebut meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Namun Wibowo (2013) menemukan sebaliknya bahwa *government effectiveness* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena semakin baik dan efektif kualitas pelayanan publik suatu negara berarti pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menerapkan kebijakan dan memberikan pelayanan publik tersebut akan semakin kecil. Sehingga dengan berkurangnya biaya yang dikeluarkan oleh kedua pihak dalam melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik, hal tersebut akan meningkatkan kualitas

*government effectiveness* suatu negara. Jadi makin baik *government effectiveness* di suatu negara tersebut berarti pertumbuhan ekonominya semakin meningkat, karena pengeluaran yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan dan pelayanan publik tersebut menjadi lebih efisien. Berikut ini disajikan perkembangan *government effectiveness* di enam negara ASEAN.

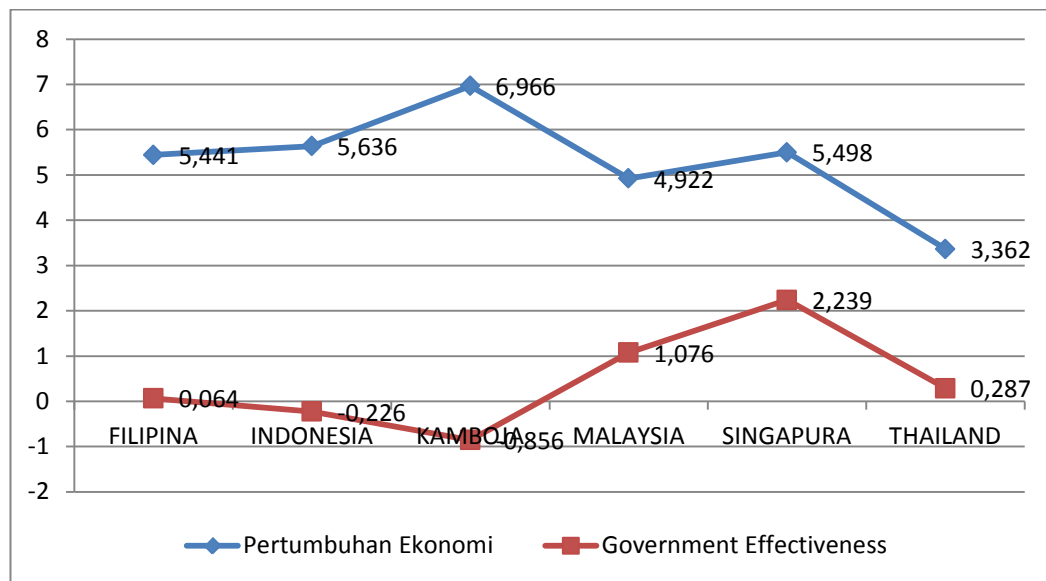
**Tabel 3. Indeks *Government Effectiveness* di Enam Negara ASEAN tahun 2006-2015**

NO	NEGARA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
1	FILIPINA	-0,04	0,09	0,03	-0,03	-0,02	0,08	0,11	0,12	0,19	0,11	0,064
2	INDONESIA	-0,34	-0,28	-0,23	-0,28	-0,19	-0,25	-0,27	-0,19	-0,01	-0,22	-0,226
3	KAMBOJA	-0,96	-0,87	-0,96	-0,91	-0,92	-0,85	-0,81	-0,91	-0,68	-0,69	-0,856
4	MALAYSIA	1,22	1,24	1,11	0,99	1,13	1,03	0,93	1,01	1,14	0,96	1,076
5	SINGAPURA	2,18	2,38	2,43	2,28	2,25	2,17	2,17	2,09	2,19	2,25	2,239
6	THAILAND	0,42	0,37	0,23	0,28	0,2	0,21	0,22	0,24	0,34	0,36	0,287

Sumber: *World Bank* 2017, diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa bahwa dari enam negara ASEAN, *government effectiveness* yang memiliki nilai indeks 2,5 dan lebih baik adalah Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand sedangkan yang memiliki kecenderungan *government effectiveness* yang memiliki nilai indeks -2,5 kurang baik yaitu Indonesia dan Kamboja.

Sedarmayanti (2003) menyatakan ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan *government effectiveness*. Untuk melihat hubungan antara *government effectiveness* dan pertumbuhan ekonomi ASEAN, maka dapat dilihat dari Gambar 2 di bawah ini:



**Gambar 2. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan *Government Effectiveness* di Enam Negara ASEAN**

Gambar 2 diatas memperlihatkan bahwa efektivitas pemerintah rendah maka pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN tinggi, karena pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN bergantung pada tata kelola pemerintahannya. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan *government effectiveness* di enam negara ASEAN sudah berjalan dengan baik.

*Government effectiveness* Kamboja terendah di enam negara ASEAN dengan nilai rata-rata sebesar -0,856 dengan pertumbuhannya sebesar 6,966% menunjukkan bahwa Kamboja memiliki efektivitas pemerintah yang kurang baik karena Kamboja pernah mengalami konflik, sehingga efektivitas pemerintahnya rendah. Sedangkan *government effectiveness* terbesar yaitu Singapura dengan nilai rata-rata sebesar 2,239 dengan pertumbuhannya sebesar 5,498%, dimana pertumbuhan ekonomi Singapura terbesar di enam negara ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah Singapura sudah sangat baik karena

negara kecil, penduduk tidak banyak, pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga tata kelola pemerintahan dapat efektif.

Selain *government effectiveness*, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh *regulatory quality*. Marlina (2016) menemukan bahwa *regulatory quality* merupakan ukuran kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan mempromosikan pengembangan sektor swasta. Sehingga *regulatory quality* dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara ASEAN. Namun menurut Huynh dan Jacho-Chávez (2009) yang juga menganalisis pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa *regulatory quality* yang menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, *regulatory quality* ini masih belum dapat dijadikan tolok ukur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila para pembuat kebijakan dan *rent seeker* masih mengabaikan kepentingan masyarakat yang seharusnya lebih berhak untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dari penerapan kebijakan tersebut. Berikut ini disajikan perkembangan *regulatory quality* di enam negara ASEAN.

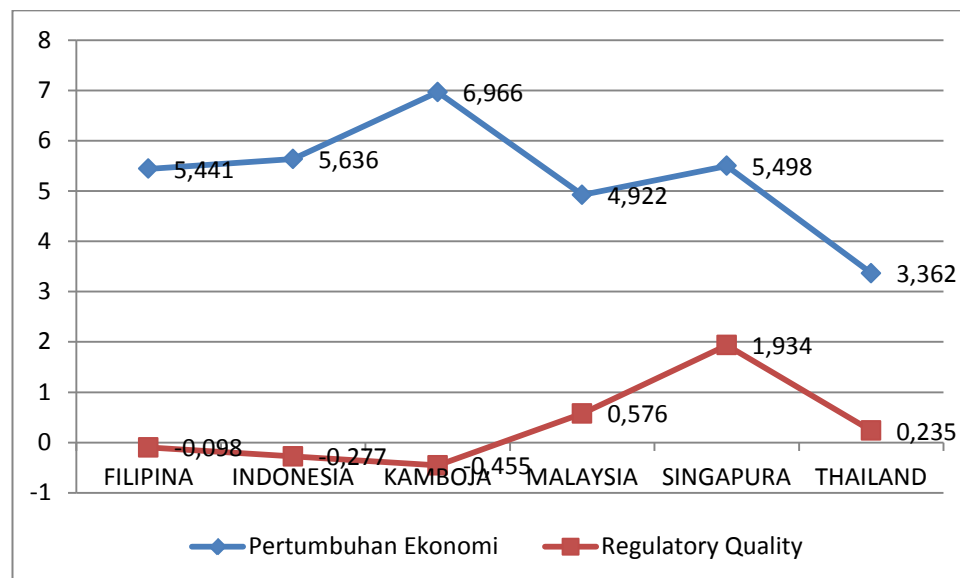
**Tabel 4. Indeks *Regulatory Quality* di Enam Negara ASEAN tahun 2006-2015**

NO	NEGARA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
1	FILIPINA	-0,15	-0,1	-0,06	-0,09	-0,21	-0,21	-0,05	-0,06	-0,01	-0,04	-0,098
2	INDONESIA	-0,33	-0,31	-0,32	-0,34	-0,39	-0,33	-0,26	-0,18	-0,1	-0,21	-0,277
3	KAMBOJA	-0,58	-0,47	-0,44	-0,47	-0,46	-0,57	-0,34	-0,34	-0,4	-0,48	-0,455
4	MALAYSIA	0,56	0,53	0,33	0,31	0,6	0,59	0,58	0,65	0,84	0,77	0,576
5	SINGAPURA	1,77	1,83	1,9	1,8	1,8	1,8	1,97	1,98	2,23	2,26	1,934
6	THAILAND	0,26	0,16	0,23	0,24	0,19	0,22	0,25	0,23	0,27	0,3	0,235

Sumber: *World Bank* 2017, diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari enam negara ASEAN, *regulatory quality* yang memiliki nilai indeks 2,5 dan lebih baik adalah Malaysia, Singapura, dan Thailand sedangkan yang memiliki kecenderungan *regulatory quality* yang memiliki nilai indeks -2,5 kurang baik yaitu Filipina, Indonesia, dan Kamboja.

Menurut Marlina (2016) ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan *regulatory quality*. Untuk melihat hubungan antara *regulatory quality* dan pertumbuhan ekonomi ASEAN, maka dapat dilihat dari Gambar 3 di bawah ini:



**Gambar 3. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan *Regulatory Quality* di Enam Negara ASEAN**

Gambar 3 memperlihatkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN. Maka indeks *regulatory quality* di enam negara ASEAN dapat ditingkatkan sehingga pertumbuhan ekonominya semakin baik. *Regulatory quality* Kamboja terendah di enam negara ASEAN dengan nilai rata-rata sebesar -0,455 dengan pertumbuhan

ekonominya sebesar 6,966% menunjukkan bahwa Kamboja memiliki *regulatory quality* yang kurang baik karena Kamboja pernah mengalami konflik sehingga sulit dan membutuhkan waktu lama untuk mengembangkan sektor-sektor yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Kamboja. Sedangkan *regulatory quality* terbesar yaitu Singapura dengan nilai rata-rata sebesar 1,934 dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 5,498%, dimana pertumbuhan ekonomi Singapura terbesar di enam negara ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa *regulatory quality* yang lebih baik karena Singapura negara kecil sehingga dapat mudah mengatur tata kelola pemerintahannya.

Adapun *rule of law* yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara terutama 6 negara ASEAN. *Rule of law* merupakan satu indikator penting dalam menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik sebab *rule of law* mampu membatasi kewenangan pemerintah agar tidak menjadi pemerintahan yang korup. Pemerintah yang patuh pada hukum dapat menjalankan tupoksi, kewenangan dan tanggung jawabnya. *Rule of law* mampu menjamin pemerintahan berjalan dengan bersih dan baik, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat membawa dampak yang luas bagi kemajuan perekonomian serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan hasil bahwa apabila terjadi peningkatan pada kepatuhan masyarakat dalam menaati peraturan dan menegakkan hukum maka akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Hasil senada juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Resnick dan Birner (2006) yang menemukan adanya hubungan positif antara *rule of law* mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Haggard dan Tiede (2010) juga

menganalisis hubungan kausalitas antara *rule of law* dengan pertumbuhan ekonomi, mereka menemukan bahwa *rule of law* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju. Berikut ini disajikan perkembangan *rule of law* di enam negara ASEAN.

**Tabel 5. Indeks *Rule of Law* di Enam Negara ASEAN tahun 2006-2015**

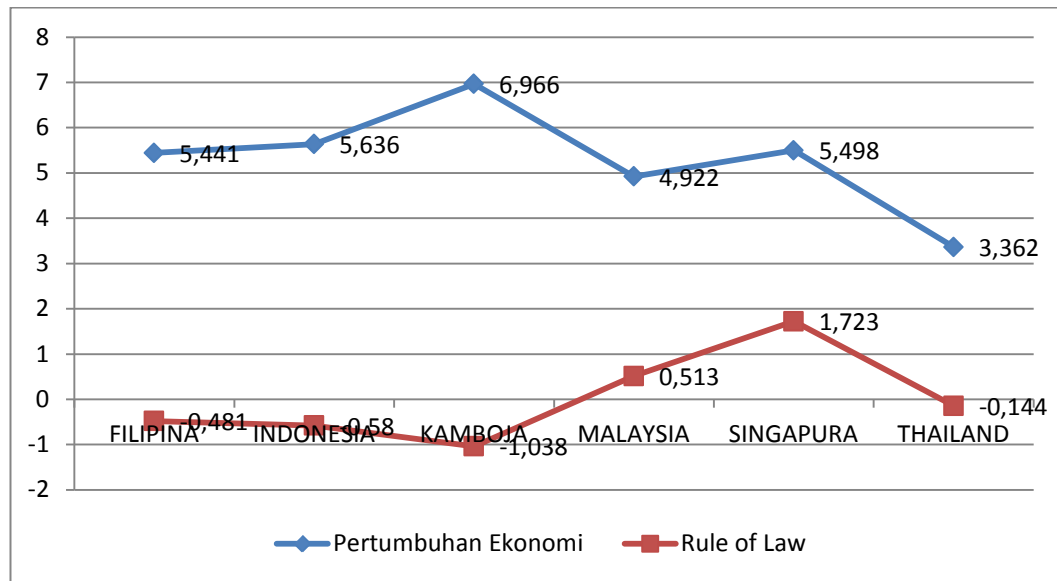
NO	NEGARA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
1	FILIPINA	-0,41	-0,48	-0,56	-0,6	-0,58	-0,54	-0,54	-0,42	-0,33	-0,35	-0,481
2	INDONESIA	-0,73	-0,68	-0,66	-0,59	-0,64	-0,61	-0,59	-0,54	-0,35	-0,41	-0,58
3	KAMBOJA	-1,19	-1,09	-1,11	-1,09	-1,09	-1,02	-0,96	-0,98	-0,93	-0,92	-1,038
4	MALAYSIA	0,53	0,5	0,38	0,49	0,53	0,52	0,5	0,47	0,64	0,57	0,513
5	SINGAPURA	1,63	1,65	1,64	1,6	1,68	1,73	1,78	1,75	1,89	1,88	1,723
6	THAILAND	-0,03	-0,09	-0,14	-0,22	-0,2	-0,21	-0,16	-0,13	-0,15	-0,11	-0,144

Sumber: *World Bank* 2017, diolah

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari enam negara ASEAN, *rule of law* yang memiliki nilai indeks 2,5 dan lebih baik adalah Malaysia dan Singapura sedangkan yang memiliki kecenderungan *rule of law* yang memiliki nilai indeks -2,5 kurang baik yaitu Filipina, Indonesia, Kamboja, dan Thailand.

Menurut Edy (2013), *rule of law* memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat hubungan antara *rule of law* dan pertumbuhan ekonomi ASEAN, maka dapat dilihat dari Gambar 4 di bawah ini:





**Gambar 4. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan *Rule of Law* di Enam Negara ASEAN**

Gambar 4 memperlihatkan *rule of law* di enam negara ASEAN sudah menerapkan aturan hukum yang jelas, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka dengan adanya *rule of law* yang jelas, dapat mengurangi tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.

*Rule of law* Kamboja terendah di enam negara ASEAN dengan nilai rata-rata sebesar -1,038 dengan pertumbuhannya sebesar 6,966% menunjukkan bahwa Kamboja memiliki *rule of law* yang kurang baik karena kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan karena terjadinya konflik yang mempengaruhi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan *rule of law* terbesar yaitu Singapura dengan nilai rata-rata sebesar 1,723 dengan pertumbuhannya sebesar 5,498%, dimana pertumbuhan ekonomi Singapura terbesar di enam negara ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa *rule of*

*law* yang lebih baik diantara negara ASEAN lainnya karena Singapura memiliki kesadaran hukum yang berlaku sangat tinggi, apabila melakukan kesalahan akan dikenakan denda.

*Control of corruption* yang merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Huynh dan Jacho-Chávez (2009) menemukan bahwa *control of corruption* menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, *control of corruption* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Aidt, Dutta, dan Sena (2008) juga menganalisis pengaruh antara *corruption perception index* dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di negara yang mempunyai kualitas institusi rendah, maka korupsi tinggi sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini disajikan perkembangan *control of corruption* di enam negara ASEAN.

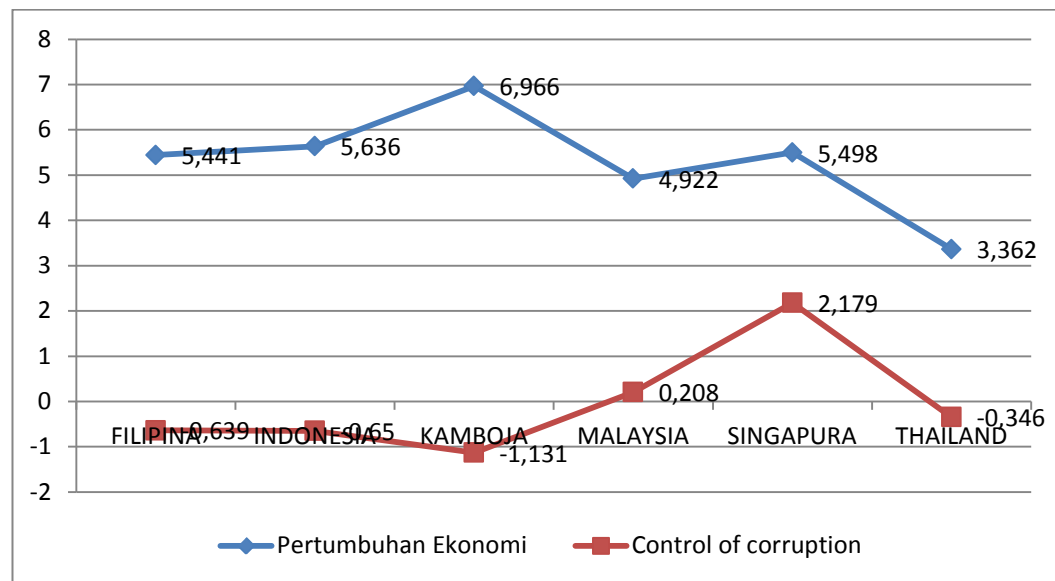
**Tabel 6. Indeks *Control of Corruption* di Enam Negara ASEAN tahun 2006-2015**

NO	NEGARA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
1	FILIPINA	-0,82	-0,7	-0,75	-0,77	-0,8	-0,7	-0,58	-0,4	-0,44	-0,43	-0,639
2	INDONESIA	-0,81	-0,58	-0,56	-0,82	-0,74	-0,68	-0,66	-0,62	-0,58	-0,45	-0,65
3	KAMBOJA	-1,23	-1,1	-1,2	-1,16	-1,23	-1,22	-1,04	-1,01	-1,08	-1,04	-1,131
4	MALAYSIA	0,29	0,25	-0,03	-0,03	0,13	0,05	0,27	0,39	0,48	0,28	0,208
5	SINGAPURA	2,2	2,25	2,25	2,25	2,21	2,12	2,17	2,09	2,12	2,13	2,179
6	THAILAND	-0,36	-0,34	-0,4	-0,28	-0,31	-0,29	-0,34	-0,33	-0,41	-0,4	-0,346

Sumber: *World Bank* 2017, diolah

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari enam negara ASEAN, *control of corruption* yang memiliki nilai indeks 2,5 dan lebih baik adalah Malaysia dan Singapura sedangkan yang memiliki kecenderungan *control of corruption* yang memiliki nilai indeks -2,5 kurang baik yaitu Filipina, Indonesia, Kamboja, dan Thailand.

Sanyal (2011) menyatakan *control of corruption* memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat hubungan antara *control of corruption* dan pertumbuhan ekonomi ASEAN, maka dapat dilihat dari Gambar 5 di bawah ini:



**Gambar 5. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan Control of Corruption di Enam Negara ASEAN**

Gambar 5 memperlihatkan *control of corruption* yang rendah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. Hal ini disebabkan karena *control of corruption* yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan baik, dengan adanya penindakan secara hukum sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN.

*Control of corruption* terendah yaitu Kamboja dengan nilai rata-rata sebesar -1,038 dengan pertumbuhannya sebesar 6,966% menunjukkan bahwa

Kamboja memiliki *control of corruption* yang kurang baik karena tidak adanya kontrol dari pemerintah sehingga tingkat korupsi semakin tinggi. Sedangkan *control of corruption* terbesar yaitu Singapura dengan nilai rata-rata sebesar 1,723 dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 5,498%, dimana pertumbuhan ekonomi Singapura terbesar di enam negara ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa *control of corruption* yang lebih baik karena tingkat kesadaran masyarakat tinggi, disebabkan pengawasan korupsi dari pemerintah sangat baik.

### **B. Rumusan Masalah**

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi tidak hanya variabel pajak, FDI (*Foreign Direct Investment*), investasi, inflasi, dan suku bunga (Kartika Dewi, 2015). Tetapi dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang diwakili oleh *government effectiveness, regulatory quality, rule of law*, dan *control of corruption*. Kondisi di ASEAN ternyata beberapa negara yang memiliki instrumen tata kelola pemerintahan yang baik, belum tentu memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik.

Berdasarkan uraian maka rumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu: Bagaimana pengaruh *tax ratio, government effectiveness, regulatory quality, rule of law*, dan *control of corruption* mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris bahwa apakah *tax ratio*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption* mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2015.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai tata kelola pemerintahan di negara-negara ASEAN.

2. Bagi peneliti lainnya

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari:

Bab I           Pendahuluan. Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II           Tinjauan Pustaka. Berisikan tinjauan teoritis, tinjauan empiris, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang relevan.

Bab III	Metodologi Penelitian. Terdiri dari jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, model penelitian, uji asumsi klasik, metode analisis data panel, uji pemilihan model, dan uji kriteria statistik.
Bab IV	Hasil dan Pembahasan
Bab V	Simpulan dan Saran
	Daftar Pustaka
Lampiran	

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Teoritis**

#### **2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi merupakan proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh dan berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil. Pertumbuhan ekonomi juga terjadi apabila ada kenaikan output perkapita dimana menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Pada periode tertentu, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat. Dimana aktivitas tersebut merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output yang akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Riyad, 2012).

Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan perekonomiannya. Sedangkan menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai

kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya dimana kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Selain itu dalam bukunya yang lebih awal *Modern Economic Growth* tahun 1966, ia mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu kenaikan terus menerus dalam produk per kapita atau per pekerja, seringkali diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk dan biasanya dengan perubahan struktural (Jhingan, 2004).

Menurut Smith bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang (Furceri dan Karras, 2017).

Ada empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu :



1. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (*human resources*).
2. Pertumbuhan penduduk.
3. Kemajuan teknologi.
4. Sistem kelembagaan.

Manfaat Pertumbuhan Ekonomi antara lain sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional pendapatan perkapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan perkapita dengan kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya.
2. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya.
3. Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya (tenaga kerja dan modal). (Dornbuch dan Fischer, 1994)

### **2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Teori-teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang antara lain:

#### **1. Teori Keynes**

Teori ini menyatakan bahwa trend ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonom klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan output potensial, Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Keynes berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya (sehingga permintaan agregat bertambah). Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal (Purbadharmaja, 2010).

Pada teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal.

Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh. (Wibowo, 2015)

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laissez-faire capitalism* (teori kapitalisme). Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah. (Kartika, 2015)

Teori Keynes mengemukakan kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran: jika segmen masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi.

## **2. Teori Pertumbuhan Ekonomi *Endogenous***

Teori pertumbuhan endogen merupakan suatu teori pertumbuhan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang bersumber dari dalam suatu sistem (Romer, 2007). Teori pertumbuhan endogen muncul sebagai kritik terhadap teori pertumbuhan Neoklasik mengenai *diminishing marginal productivity of capital* dan konvergenitas pendapatan di berbagai negara. Berdasarkan studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak adanya konvergenitas pendapatan di berbagai negara. Hal ini karena pada negara-negara yang sudah maju, telah mengembangkan teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Kemajuan teknologi tersebut salah satunya didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mereka dapat melakukan inovasi teknologi yang dapat memberikan manfaat besar terhadap pembangunan. Sehingga walaupun negara berkembang mampu meningkatkan akumulasi modal fisiknya, akan tetapi perkembangan

tersebut belum dapat mengejar ketertinggalan dengan negara maju. Dalam hal ini teori pertumbuhan endogen menjelaskan mengapa akumulasi modal tidak mengalami *diminishing return*, tetapi justru mengalami *increasing return* dengan adanya spesialisasi dan investasi di bidang sumber daya manusia (Meier, 2000).

Teori pertumbuhan endogen memiliki tiga elemen didasari yakni, pertama, perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui proses akumulasi pengetahuan; kedua, adanya penciptaan ide baru oleh perusahaan sebagai akibat adanya mekanisme *spillover* dan *learning by doing* dan ketiga, produksi barang barang konsumsi yang dihasilkan oleh fungsi produksi pengetahuan yang tumbuh tanpa batas (Butiz dan Romer, 2007.)

Munculnya teori pertumbuhan endogen dapat dinyatakan dalam suatu persamaan:  $Y = AK$ , dimana Y merupakan tingkat output, A menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi (teknologi, sedangkan K merupakan stok modal fisik dan sumber daya manusia). Dalam model pertumbuhan tersebut tidak terjadi penurunan hasil yang menurun dari modal (*diminishing marginal of capital*) seperti pada teori neoklasik. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai eksternalitas (sumber daya manusia, kemajuan teknologi) yang dapat mengimbangi berbagai kecenderungan terjadinya penurunan hasil (Pack, Romer dan Martin, 2007). Dalam hal ini Romer menekankan pentingnya eksternalitas yang berhubungan dengan pembentukan modal manusia dan pengeluaran untuk kegiatan penelitian.

Dengan model pertumbuhan  $Y=AK\alpha$  dimana  $\alpha=1$ , maka model pertumbuhan endogen menunjukkan bahwa akumulasi modal, pengetahuan dan pengalaman (*learnig by doing*) tidak akan mengalami pertambahan hasil yang menurun. Sehingga terdapatnya peningkatan dalam rasio K/L, maka akan dapat meningkatkan Y/L secara proporsional. Kemudian rasio K/Y atau *Capital Output Ratio* (COR) akan tetap meskipun terjadi penurunan hasil yang semakin menurun. Teori pertumbuhan endogen atau teori pertumbuhan baru (*new growth theory*), teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen, yaitu pertumbuhan GNP yang ditentukan oleh pemerintah yang mengatur proses produksi dan bukan oleh kekuatan-kekuatan di luar pemerintah. Teori pertumbuhan endogen berupaya menjelaskan skala hasil yang semakin meningkat dan pola pertumbuhan jangka panjang yang berbeda-beda antar negara.

## **2.2 Rasio Pajak (*Tax Ratio*)**

*Tax ratio* atau rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam persen. *Tax ratio* menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali produk domestik bruto dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi *tax ratio* suatu negara, maka akan semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Karena semakin

tinggi juga nilai rupiah yang dapat dipungut sebagai penerimaan pajak dari setiap rupiah output nasional (GDP) (Amelia, 2014).

*Tax ratio* sebagai ukuran kinerja perpajakan telah lama diungkapkan oleh para ahli ekonomi. Meski demikian, terdapat sejumlah perdebatan mendasar yang mengemukakan tentang *tax ratio* ini.

- Masalah penerimaan pajak. Persoalan besaran *tax ratio* mungkin menjadi *uncomparable* antar negara, kecuali terdapat lembaga survei tersendiri yang melakukan perhitungan *tax ratio* secara terintegrasi dengan metodologi yang sama seperti yang dilakukan OECD terhadap negara-negara anggotanya. Bila mengacu pada perhitungan *tax ratio*, jelas bahwa jumlah penerimaan perpajakan yang dijadikan acuan sebagai faktor pembilang *tax ratio* tidak meliputi pajak daerah, restitusi dan fasilitas perpajakan. Meski demikian, bila dilakukan modifikasi terhadap jumlah penerimaan perpajakan ini tetap saja *tax ratio* kita masih ketinggalan dibandingkan beberapa negara tetangga dalam kawasan regional tertentu, apalagi bila kita membandingkannya dengan negara yang telah maju. Dalam hal ini, persoalan utamanya memang adalah bagaimana upaya untuk menggenjot penerimaan perpajakan agar *tax ratio* kita mengalami peningkatan. Namun meskipun demikian sulit bagi pemerintah untuk menaikkan *tax ratio*, selama masih ada praktek-praktek *hidden economy* yang meliputi sumbangan-sumbangan politik, sumbangan-sumbangan bagi pejabat, birokrasi, dan sebagainya. (Bisnis Indonesia, 13 November 2008)
- Masalah PDB (Produk Domestik Bruto). Masalah lain dalam keruwetan *tax ratio* ini adalah perdebatan mengenai faktor pembagi dalam formula *tax ratio*,

yaitu nilai produk domestik bruto (PDB). Masalah klasik berupa konsep harga yang secara konsep mengandung makna distorsi, proses imputasi dalam penghitungan PDB serta kemungkinan tidak tercatatnya sektor informal bahkan ekonomi bawah tanah (*underground economy*). Dalam proses perhitungan PDB riil, patokan tahun yang menjadi basis perhitungan juga bisa menjadi sangat politis karena biasanya dipilih untuk tahun yang tingkat inflasinya rendah agar hasil agregasi PDB menjadi tinggi.

### **2.3 Tata Kelola Pemerintahan**

Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara menurut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan, termasuk birokrasinya, sehingga memungkinkan interaksi perekonomian antardaerah dan antarbangsa berlangsung lebih efisien. Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing, dan kunci dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, serta mutu ketepatan dan kepastian kebijakan publik. Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing dan kunci dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, mutu, dan kepastian kebijakan publik.

Tata kelola yang baik adalah yang melakukan tugasnya dan memenuhi tantangannya secara efektif, efisien, dan dengan cara yang berkontribusi terhadap legitimasi kewenangan. Legitimasi dapat ditunjukkan dalam beberapa cara, keduanya aktif dan pasif. Ini tidak memerlukan pemilihan yang bebas dan adil.



Pemerintah atau “*Government*” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “*The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc*” (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya). Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan *governance* berarti tata pemerintahan dan *good governance* bermakna tata pemerintahan yang baik. Di satu sisi istilah *good governance* dapat dimaknai secara berlainan, sedangkan sisi yang lain dapat diartikan sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya; kesejahteraan spiritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Menurut UNDP (2016), *good governance* mempunyai enam prinsip, yaitu legitimasi, hak berpendapat, transparansi dan akuntabilitas, kinerja, dan keadilan.

UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi :

- a. Partipasi (*participation*). Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- b. Aturan Hukum (*rule of law*). Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Transparansi (*transparancy*). Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.
- d. Daya Tanggap (*responsiveness*). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- e. Berorientasi Konsensus (*consensus orientation*). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- f. Berkeadilan (*equity*). Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. Efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*). Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.

h. Akuntabilitas (*accountability*). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (*stakeholders*).

i. Visi Strategis (*strategic holders*). Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* tersebut saling memperkuat dan terkait serta tidak berdiri sendiri.

Menurut Laode Ida (2002), ciri-ciri *Good Governance* adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi.
2. Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
3. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), di mana ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
4. Keseimbangan kekuatan (*balance of forces*), di mana dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama.

5. Interdependensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi yang fasilitasi.

#### **2.4 Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*World Governance Index / WGI*)**

Dalam tataran implementatif, guna mewujudkan *good governance* maka diperlukan metode untuk mengukur kapasitas *good governance* itu yang sering disebut sebagai pengukuran *Indeks Good Governance* (IGG). Pengukuran mengenai indeks tata kelola pemerintahan, khususnya yang berbasis *governance* sudah mulai dilakukan sejak tahun 1998 melalui indeks yang disusun oleh Jeff Huther dan Anwar Shah. Namun, selain indeks tersebut, sebenarnya ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun indeks pemerintahan berbasis *governance*. Secara umum, berbagai pendekatan tersebut membangun indikator-indikator *governance* dengan berlandaskan pada konsep *governance* yang antara lain terutama mensyaratkan adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum (*rule of law*).

Indikator yang digunakan dalam survei ini mencakup isu-isu *governance* seperti: (1) akuntabilitas; (2) partisipasi; (3) penegakan hukum; (4) keadilan; (5) responsivitas politisi; (6) tingkat KKN; serta (7) kualitas pelayanan publik. Berbeda dari model-model sebelumnya yang melakukan pengukuran Indeks *Good Governance* untuk tingkat pemerintah pusat (nasional), GDS melakukan pengukuran IGG untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi (Bappenas, 2008).

Tujuan dari indeks tata kelola pemerintahan yaitu:

1. Menciptakan *World Governance Index* (WGI) yang memberikan gambaran keseluruhan tata kelola dunia pada saat berdasarkan data yang diperoleh untuk 179 negara yang termasuk dalam survei. WGI menggabungkan 5 indikator, masing-masing terdiri dari 13 sub-indikator, masing-masing terdiri dari 37 indeks. Indeks ini dipilih dari database terbaik yang tersedia. Semuanya disediakan oleh sumber yang dikenal, yang terkenal dengan kualitas, keseriusan, dan keandalannya.

**Tabel 7. Faktor-faktor yang membentuk *World Governance Index***

<b>Indikator</b>	<b>Sub-Indikator</b>	<b>Indeks</b>
Rule of Law	Badan Hukum	Ratifikasi Internasional
		Perjanjian
	Sistem yang Legal	Perlindungan Hak Milik
Kemerdekaan		
Efektivitas		
Korupsi	Partisipasi	Penyelesaian Sengketa
		Kontrak
		Indeks Persepsi Korupsi
Hak Asasi Manusia/Partisipasi	Hak Sipil dan Politik	Menghormati hak-hak sipil
		Menghormati hak integritas fisik
		Kebebasan pers
Partisipasi	Partisipasi	Kekerasan terhadap pers
		Partisipasi dalam kehidupan politik
		Proses pemilu dan pluralisme
Pembangunan Berkelanjutan	Sektor Ekonomi	Budaya politik
		GDP per kapita
		Tingkat pertumbuhan GDP
Pembangunan Manusia	Kesejahteraan/Kebahagiaan	Tingkat Inflasi
		Kemudahan dalam memulai bisnis
		Pembangunan Manusia
		Kesejahteraan subyektif
		Kebahagiaan

Sumber : *World Bank*, 2017

2. Memotivasi aktor-aktor tata kelola dunia untuk mempertimbangkan WGI yang dihasilkan dan kepentingan relatif dari berbagai indikator. Ini memungkinkan mereka mengidentifikasi indikator "kunci" atau "pilot" yang akan menyiapkan kondisi untuk tata kelola dunia yang baik dan yang lebih penting, menjamin keberlanjutannya. Atas dasar situasi yang digambarkan oleh WGI dan diagnosisanya, seharusnya memungkinkan aktor yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mengajukan pertanyaan yang tepat untuk mempertimbangkan solusi.

## **2.5 Indikator Tata Kelola Dunia (*Worldwide Governance Indicators / WGI*)**

*World Bank* melalui *Macroeconomics and Growth Team Development Research Group*, sejak tahun 1996 mengeluarkan enam indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas *good governance* di tiap negara yaitu: *control of corruption*, *government effectiveness*, *political stability and absence of violence*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *voice and accountability*. Setiap indikator yang dikeluarkan oleh *World Bank* menggunakan penilaian indeks antara -2,5 sampai dengan 2,5. Dimana angka -2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terbaik. Namun hanya empat indikator yang penting dalam menjalankan suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara yaitu:

### **2.5.1. Government Effectiveness**

Menurut *World Bank*, *government effectiveness* yaitu mencerminkan persepsi kualitas layanan publik, kualitas layanan sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut.

Menurut MCC (*Millennium Challenge Corporation*) indikator *government effectiveness* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Kompetensi pegawai negeri; implementasi keputusan pemerintah yang efektif; dan kerentanan pelayanan publik terhadap tekanan politik;
2. Kemampuan untuk mengelola alternasi politik tanpa perubahan kebijakan atau interupsi yang drastis dalam pelayanan pemerintah;
3. Fleksibilitas, pembelajaran, dan inovasi dalam kepemimpinan politik; kemampuan untuk mengkoordinasikan tujuan yang bertentangan menjadi kebijakan yang koheren;
4. Efisiensi mobilisasi pendapatan dan pengelolaan anggaran;
5. Kualitas infrastruktur transportasi, telekomunikasi, pasokan listrik, penyediaan layanan kesehatan masyarakat, dan sekolah negeri; ketersediaan layanan pemerintah online;
6. Konsistensi kebijakan; sejauh mana komitmen pemerintah dihormati oleh pemerintah baru;
7. Prevalensi birokrasi; sejauh mana penundaan birokrasi menghambat aktivitas bisnis;

8. Adanya layanan informasi dan pembayar pajak, dan mekanisme banding yang efisien dan efektif;
9. Sejauh mana:
  1. Mekanisme koordinasi yang efektif memastikan konsistensi kebijakan lintas batas departemen, dan struktur administrasi disusun di sepanjang garis fungsional dengan sedikit duplikasi;
  2. Proses bisnis instansi pemerintah ditinjau secara berkala untuk memastikan efisiensi pengambilan keputusan dan pelaksanaan;
  3. Kepemimpinan politik menetapkan dan mempertahankan prioritas strategis dan pemerintah secara efektif menerapkan reformasi;
  4. Perekrutan dan promosi di dalam pemerintahan didasarkan pada prestasi dan kinerja, dan standar etika berlaku;
  5. RUU upah pemerintah berkelanjutan dan tidak mengherankan pengeluaran yang dibutuhkan untuk layanan publik; Tingkat gaji dan tunjangan tidak menghalangi orang-orang berbakat memasuki sektor publik; fleksibilitas (yang tidak disalahgunakan) ada untuk membayar gaji yang lebih menarik dalam posisi sulit diisi;
  6. Pendapatan pemerintah dihasilkan oleh pajak distorsi rendah; tarif impor rendah dan relatif seragam, rabat ekspor atau kekurangan tugas bersifat fungsional; basis pajaknya luas dan bebas dari pembebasan sewenang-wenang; administrasi perpajakan efektif dan berbasis aturan; dan biaya administrasi dan kepatuhan pajak rendah;



7. Kebijakan dan prioritas terkait dengan anggaran; proyeksi pengeluaran multi tahun diintegrasikan ke dalam proses perumusan anggaran, dan mencerminkan implikasi eksplisit dari implikasi dari inisiatif kebijakan baru; anggaran diformulasikan melalui konsultasi sistematis dengan kementerian pengeluaran dan legislatif, mengikuti kalender anggaran tetap; sistem klasifikasi anggaran komprehensif dan konsisten dengan standar internasional; dan pengeluaran di luar anggaran dijaga seminimal mungkin dan ditangani secara transparan;
8. Anggaran di implementasikan sesuai rencana, dan pengeluaran aktual hanya menyimpang dari tingkat yang direncanakan;
9. Pemantauan anggaran terjadi sepanjang tahun berdasarkan sistem informasi manajemen yang berfungsi dengan baik; rekonsiliasi catatan perbankan dan fiskal dipraktekkan secara komprehensif, tepat, dan tepat waktu;
10. Laporan keuangan tahun-tahun dan rekening publik disiapkan segera dan teratur dan memberikan data yang lengkap dan akurat; sejauh mana akun diaudit secara tepat waktu, profesional dan komprehensif, dan tindakan yang tepat diambil berdasarkan laporan anggaran dan temuan audit.

### 2.5.2 *Regulatory Quality*

Menurut *World Bank*, *regulatory quality* yaitu kualitas regulasi menangkap persepsi kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang baik mengizinkan dan mempromosikan pembangunan sektor swasta. Menurut OECD (*Organisation For Economic Co-Operation and Development*), kualitas sistem peraturan suatu negara sangat bergantung pada bagaimana caranya peraturan disusun dan dibuat. Pemerintah berkepentingan untuk memastikan bahwa peraturan mereka beroperasi secara efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial kesejahteraan dan standar lingkungan.

Menurut MCC (*Millennium Challenge Corporation*) indikator *regulatory quality* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Prevalensi peraturan dan persyaratan administratif yang memberatkan bisnis; kemudahan memulai dan menutup bisnis baru; kemudahan mendaftarkan properti;
2. Intervensi pemerintah dalam ekonomi; sejauh mana subsidi pemerintah membuat industri yang tidak kompetitif hidup;
3. Kebijakan pasar tenaga kerja; undang-undang ketenagakerjaan memberikan keleluasaan dalam mempekerjakan dan pemecatan; kontrol upah dan harga;
4. Kompleksitas dan efisiensi sistem perpajakan; kebijakan pajak pro-investasi;

5. Kebijakan perdagangan; ketinggian hambatan tarif; jumlah band tarif; stabilitas tarif; sejauh mana hambatan non-tarif digunakan; transparansi dan prediktabilitas rezim perdagangan;
6. Daya tarik investasi; prevalensi larangan atau persyaratan perizinan investasi; peraturan keuangan tentang investasi dan modal asing; pembatasan legal atas kepemilikan bisnis dan ekuitas oleh bukan penduduk; peraturan mata uang asing; ketidakpastian umum tentang biaya regulasi; peraturan hukum lembaga keuangan; sejauh mana kebijakan nilai tukar menghambat daya saing perusahaan;
7. Kelengkapan aturan hukum dan efektifitas peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan sekuritas; biaya peraturan, undang-undang, atau kebijakan pemerintah yang tidak pasti;
8. Kekuatan sistem perbankan; adanya hambatan memasuki sektor perbankan; kemudahan akses ke pasar modal; perlindungan bank domestik dari persaingan asing; apakah suku bunga sangat diatur; biaya transfer yang terkait dengan modal ekspor;
9. Partisipasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur; dominasi perusahaan milik negara; keterbukaan kontrak sektor publik terhadap investor asing; tingkat persaingan pasar; efektivitas kebijakan dan undang-undang persaingan dan anti-*trust*;
10. Adanya kerangka kebijakan, hukum, dan kelembagaan yang mendukung pengembangan sektor keuangan perdesaan berbasis pasar yang efisien,

adil, dan dapat diakses oleh penduduk berpendapatan rendah di daerah pedesaan;

11. Penerapan kerangka kebijakan, hukum, dan peraturan yang tepat untuk mendukung kemunculan dan pengembangan sektor usaha pedesaan swasta yang efisien; penetapan prosedur sederhana, cepat dan transparan untuk membangun usaha agribisnis swasta;
12. Adanya kerangka kebijakan, hukum, dan kelembagaan yang mendukung pengembangan dan liberalisasi pasar pertanian berbasis komersial (untuk input dan produksi) yang beroperasi secara liberal dan sektoral, efisien secara fungsional dan adil, dan dapat diakses. untuk petani kecil; dan
13. Sejauh mana:
  1. Undang-undang tata kelola perusahaan mendorong kepemilikan dan pengungkapan keuangan dan melindungi hak pemegang saham, dan umumnya diberlakukan;
  2. Intervensi negara di pasar barang dan lahan umumnya terbatas pada peraturan dan undang-undang untuk memperlancar ketidaksempurnaan pasar;
  3. Layanan pabean bebas dari korupsi, beroperasi secara transparan, bergantung pada manajemen risiko, memproses koleksi tugas, dan mengembalikan uang segera; dan
  4. Undang-undang, peraturan, dan pedoman perdagangan diterbitkan, disederhanakan, dan dirasionalisasi.

### 2.5.3 *Rule of Law*

Menurut *World Bank*, *rule of law* yaitu aturan hukum menangkap persepsi tentang sejauh mana agen memiliki kepercayaan diri dan mematuhi peraturan masyarakat, dan khususnya peraturan kualitas penegakan kontrak, hak kepemilikan, polisi, dan pengadilan, serta kemungkinan kejahatan dan kekerasan.

Menurut Philipus M.Hadjon bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda adalah “*rechtsstaat*” ini lahir dari suatu perjuangan menentang suatu absolutisme, ialah dari kekuasaan raja yang semena-mena untuk dapat mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu didalam proses perkembangannya “*rechtsstaat*” ini lebih memiliki ciri yang revolusioner. Menurut Friederich J.Stahl, Ada 4 unsur pokok untuk berdirinya satu *rechstaat*, ialah sebagai berikut:

- Hak-hak manusia
- Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
- Peradilan administrasi dalam perselisihan

Menurut MCC (*Millennium Challenge Corporation*) indikator *rule of law* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Kepercayaan publik terhadap kepolisian dan sistem peradilan; kepatuhan terhadap hukum; tradisi hukum dan ketertiban; kekuatan dan ketidakberpihakan sistem hukum;

2. Prevalensi kejahatan kecil, kejahatan kekerasan, dan kejahatan terorganisir; penculikan asing; dampak ekonomi dari kejahatan terhadap bisnis lokal; prevalensi perdagangan manusia; komitmen pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia;
3. Sejauh mana polisi yang berfungsi dengan baik dan bertanggung jawab melindungi warga negara dan harta benda mereka dari kejahatan dan kekerasan; ketika kejahatan berat terjadi, sejauh mana mereka dilaporkan ke polisi dan diselidiki;
4. Keamanan hak milik pribadi; perlindungan kekayaan intelektual; keakuratan dan integritas dari registri properti; apakah warga negara dilindungi dari perampasan harta sewenang-wenang dan/atau tidak adil; penegakan kontrak pribadi dan kontrak pemerintah;
5. Adanya kerangka kelembagaan, hukum, dan pasar untuk kepemilikan lahan yang aman; akses yang sama terhadap tanah di antara laki-laki dan perempuan; pengelolaan sumber daya milik bersama yang efektif; hak pengguna yang adil atas sumber daya air untuk pertanian dan partisipasi lokal dalam pengelolaan sumber daya air;
6. Prevalensi penghindaran pajak dan perdagangan orang dalam; ukuran ekonomi informal;
7. Independensi, efektivitas, prediktabilitas, dan integritas peradilan; kepatuhan terhadap putusan pengadilan; jalan hukum untuk menantang tindakan pemerintah; kemampuan untuk menuntut pemerintah melalui pengadilan yang independen dan tidak memihak; kesediaan warga negara

untuk menerima putusan pengadilan atas tindakan fisik dan ilegal; kepatuhan pemerintah terhadap keputusan pengadilan, yang tidak dapat berubah kecuali melalui prosedur peninjauan kembali yang telah ditetapkan;

8. Kemerdekaan jaksa dari arah dan kontrol politik;
9. Adanya kontrol sipil yang efektif dan demokratis terhadap aparat kepolisian, militer, dan keamanan dalam negeri melalui cabang peradilan, legislatif, dan eksekutif; polisi, militer, dan dinas keamanan dalam negeri menghormati hak asasi manusia dan bertanggung jawab atas pelanggaran kekuasaan;
10. Ketidakberpihakan dan non diskriminasi dalam administrasi peradilan; warga negara diberi dengar pendapat yang adil, umum, dan tepat waktu oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak; warga negara berhak atas penasihat independen dan mereka yang dituduh melakukan tindak pidana berat diberi akses ke penasihat independen jika hal itu di luar kemampuan mereka; Cara murah tersedia untuk mengejar klaim kecil; warga negara dapat mengajukan tuntutan terhadap negara tanpa takut balas dendam;
11. Perlindungan hakim dan hakim dari campur tangan eksekutif dan legislatif; hakim ditunjuk, dipromosikan, dan dipecat dengan cara yang adil dan tidak bias; hakim dilatih secara tepat untuk melaksanakan keadilan dengan cara yang adil dan tidak bias; anggota peradilan tingkat nasional harus memberikan alasan untuk keputusan mereka; adanya

ombudsman yudisial (atau badan atau mekanisme setara) yang dapat memulai penyelidikan dan menjatuhkan hukuman pada pelaku;

12. Lembaga penegakan hukum dilindungi dari campur tangan politik dan memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan mandat mereka; penunjukan ke instansi penegak hukum dilakukan sesuai kriteria profesional; aparat penegak hukum tidak kebal dari proses pidana;
13. Adanya mekanisme pelaporan independen bagi warga negara untuk mengeluhkan tindakan polisi; ketepatan waktu respon pemerintah terhadap keluhan warga tentang tindakan polisi.

#### **2.5.4 Control of Corruption**

Menurut *World Bank*, *control of corruption* yaitu mencakup beberapa indikator untuk mengukur persepsi sejauh mana publik kekuasaan dilakukan untuk keuntungan pribadi, termasuk keduanya kecil dan bentuk korupsi yang besar, dan juga seperti "penangkapan" negara oleh elit dan kepentingan pribadi (Kaufmann et al. 2010). Menurut MCC (*Millenium Challenge Corporation*), indikator ini mengukur sejauh mana kekuasaan publik dilaksanakan untuk swasta, termasuk bentuk korupsi kecil dan besar, serta "penangkapan" negara oleh elit dan kepentingan pribadi. Ini juga mengukur kekuatan dan efektivitas kerangka kebijakan dan kelembagaan suatu negara untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Menurut MCC (*Millennium Challenge Corporation*) indikator *control of corruption* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut:



1. Prevalensi korupsi besar dan korupsi kecil di semua tingkat pemerintahan;
2. Efek korupsi terhadap "daya tarik" suatu negara sebagai tempat berbisnis;
3. Frekuensi "pembayaran tidak teratur" yang terkait dengan izin impor dan ekspor, kontrak publik, utilitas publik, penilaian pajak, dan keputusan pengadilan;
4. Nepotisme, kronisme dan patronase dalam dinas sipil;
5. Perkiraan biaya penyyuapan sebagai bagian dari penjualan tahunan perusahaan;
6. Keterlibatan pejabat terpilih, pejabat perbatasan, petugas pajak, hakim, dan hakim dalam korupsi;
7. Kekuatan dan efektivitas undang-undang, kebijakan, dan institusi anti-korupsi pemerintah;
8. Kepercayaan publik terhadap kejujuran keuangan politisi;
9. Sejauh mana:
  1. Proses diajukan untuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi di tingkat lokal;
  2. Otoritas pemerintah memantau prevalensi korupsi dan menerapkan sanksi secara transparan;
  3. Konflik kepentingan dan peraturan etika untuk pegawai negeri diamati dan ditegakkan;
  4. Deklarasi pendapatan dan aset pejabat publik harus diverifikasi dan terbuka untuk umum dan dicermati oleh media;

5. Pejabat senior pemerintah kebal dari tuntutan hukum berdasarkan hukum karena penyimpangan;
6. Pemerintah menyediakan korban korupsi dengan mekanisme yang memadai untuk mengejar hak-hak mereka;
7. Administrator pajak menerapkan sistem audit internal yang efektif untuk memastikan akuntabilitas pengumpulan pajak;
8. Proses pembuatan anggaran eksekutif bersifat komprehensif dan transparan dan tunduk pada tinjauan dan pengawasan legislatif yang berarti;
9. Pemerintah memastikan transparansi, penawaran terbuka, dan persaingan efektif dalam pemberian kontrak pemerintah;
10. Ada perlindungan hukum dan fungsional untuk *whistleblower*, aktivis anti-korupsi, dan penyidik;
11. Tuduhan korupsi di tingkat nasional dan lokal diselidiki dan diadili dengan seksama tanpa prasangka;
12. Pemerintah bebas dari peraturan birokrasi yang berlebihan, persyaratan pendaftaran, dan kontrol lainnya yang meningkatkan peluang terjadinya korupsi;
13. Warga negara memiliki hak hukum atas informasi tentang operasi pemerintah dan dapat memperoleh dokumen pemerintah dengan biaya nominal.

## B. Tinjauan Empiris

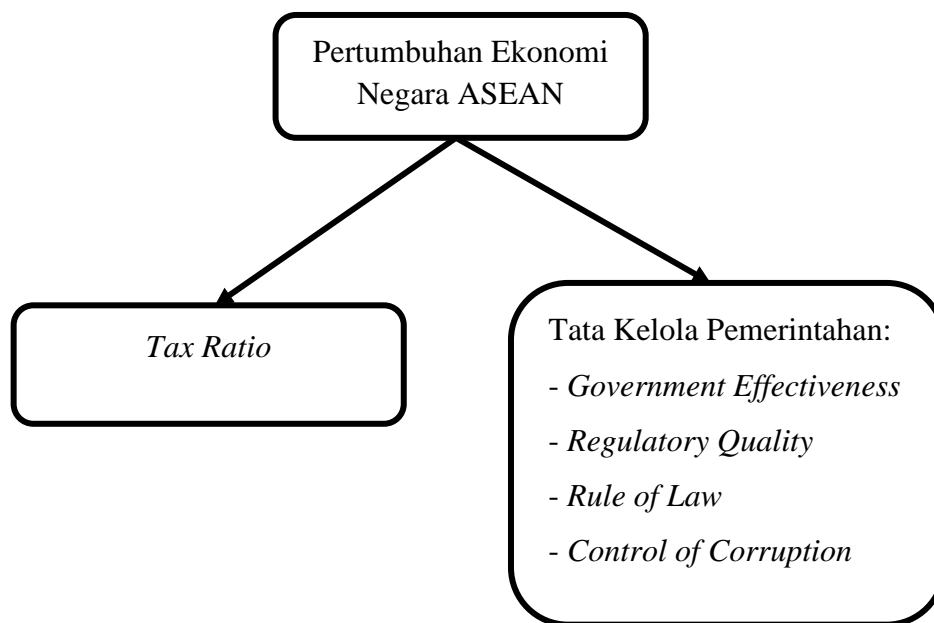
No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat	Hasil Penelitian
1.	Marlina Lumban Gaol (2016)	Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• <i>Good governance</i> yang diukur menggunakan indikator <i>control of corruption, government effectiveness, political stability and absence violence, regulatory quality, rule of law dan voice and accountability</i></li> </ul>	Panel data dengan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	<i>Control of corruption, government effectiveness, rule of law, dan voice and accountability</i> tidak signifikan sedangkan <i>political stability and absence violence</i> dan <i>regulatory quality</i> berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN.
2.	Edy Wibowo (2013)	Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• <i>Voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption</i></li> </ul>	Data panel	<i>Government effectiveness</i> dan <i>rule of law</i> berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	Md Rafayet Alam, Erick Kitenge, Bizuayehu Bedane (2017)	<i>Government Effectiveness</i> dan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• <i>Government Effectiveness</i></li> </ul>	<i>System Generalized Method of Moments</i> (System GMM).	<i>Government effectiveness</i> berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.	Daniel Kaufman, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi (2005)	<i>Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Worldwide Governance Indicators</i> (WGI)</li> <li>• <i>Voice and Accountability, Political Stability and</i></li> </ul>		Kualitas tata kelola di sejumlah negara telah berubah secara signifikan (di kedua arah), memberikan bukti yang menunjukkan bahwa tidak ada

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat	Hasil Penelitian
			<i>Absence of Violence/Terrorism, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, dan Control of Corruption.</i>		kecenderungan, untuk keadaan yang lebih baik atau lebih buruk, dalam rata-rata global pemerintahan.
5.	Ida Bagus Putu Purbadharma (2010)	Implikasi Desentralisasi Fiskal dan <i>Good Governance</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Struktur anggaran, pertumbuhan ekonomi, disparitas regional dan <i>good governance</i></li> </ul>	<i>Partial Least Square (PLS)</i>	<i>Good governance</i> dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Struktur anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Disparitas Regional. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap struktur anggaran. Desentralisasi fiskal dan struktur anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap <i>good governance</i> . Desentralisasi fiskal, struktur anggaran dan <i>good governance</i> berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
6.	William Gale dan Andrew Samwick (2016)	<i>Effects of Income Tax Changes on Economic Growth</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pajak</li> </ul>		Tidak semua perubahan pajak akan memiliki dampak yang sama pada pertumbuhan ekonomi. Memperbaiki insentif, mengurangi subsidi distorsi yang ada, hindari keuntungan <i>windfall</i> , dan menghindari defisit pembiayaan memiliki efek yang lebih baik pada jangka panjang ekonomi, namun menciptakan <i>trade-off</i> antara ekuitas dan efisiensi.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat	Hasil Penelitian
7.	Chye-Ching Huang dan Nathaniel Frentz (2014)	<i>What Really Is the Evidence on Taxes and Growth?</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pajak</li> </ul>		Kenaikan pajak dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi sehingga pajak dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
8.	Gökhan Dökmen (2013)	<i>Environmental Tax and Economic Growth : A Panel VAR Analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• <i>Environmental Tax</i></li> </ul>	<i>Panel VAR Analysis</i>	Dengan menggunakan model <i>Panel Vector Autoregressive</i> , menemukan tanggapan positif dan statistik yang signifikan terhadap <i>shock</i> pajak lingkungan.
9.	Yilmaz Bayar (2016)	<i>Public Governance And Economic Growth In The Transitional Economies Of The European Union</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• <i>Voice and accountability, political stability and the absence of violence/terrorism, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and control of corruption</i></li> </ul>	Panel data	<i>Regulatory quality</i> memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga <i>control of corruption</i> dan <i>rule of law</i> memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sementara <i>political stability</i> memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
10.	Asli Ozpolat, Gulsum Gunbala Guven, Ferda Nakipoglu Ozsoy, dan Ayse Bahar (2016)	<i>Does Rule of Law Affect Economic Growth Positively?</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• <i>Rule of law, fight against corruption, voice and accountability</i></li> </ul>	<i>System Generalized Method of Moments (System GMM)</i> .	<i>Rule of law</i> merupakan dasar pembangunan sosio-ekonomi. Pencegahan korupsi dan kebebasan berekspresi, struktur kelembagaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### C. Kerangka Pemikiran

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption* dan *tax ratio* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.



**Gambar 6. Kerangka Pemikiran**

### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui data-data yang diperoleh, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga *tax ratio* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2015.

2. Diduga *government effectiveness* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2015.
3. Diduga *regulatory quality* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2015.
4. Diduga *rule of law* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2015.
5. Diduga *control of corruption* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2006-2015.
6. Diduga *tax ratio, government effectiveness, regulatory quality, rule of law*, dan *control of corruption* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara- negara ASEAN selama 2006-2015.

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder. Data akan diolah menggunakan teknik data panel yang merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Data *cross section* dalam penelitian ini adalah data negara ASEAN dengan *time series* periode 2006 sampai 2015. Data masing-masing variabel didapat dari *World Bank*. Namun dari 11 negara ASEAN, hanya ada 6 negara ASEAN yang memiliki kelengkapan data dari tahun 2006 hingga tahun 2015 yaitu Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Thailand sehingga dalam penelitian sebagai sampel data ada 6 negara ASEAN.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Variabel-variabel pada penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, *tax ratio*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption* sebagai variabel independen.

##### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi (Y) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi



suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, diukur dengan menggunakan persen (Riyad,2012).

$$\text{Rumus} = \left( \frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}} \right) \times 100\%$$

Dimana :  $GDP_t$  = *Gross Domestic Product* H konstan tahun t  
 $GDP_{t-1}$  = GDP harga konstan sebelum tahun t  
 (McEachern, 2001)

## 2. Rasio Pajak (*Tax Ratio*)

*Tax Ratio* ( $X_1$ ) merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto suatu negara (OECD, 2012). *Tax ratio* dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara, diukur dengan menggunakan persen (Gökhan Dökmen, 2013).

## 3. Indikator Tata Kelola Pemerintahan (*World Governance Indicators*)

Menurut Kaufmann et al. dalam Huynh dan Jacho-Chavez (2009), *World Governance Indicators* (WGI) yang disediakan oleh *World Bank* mengukur tata kelola pemerintahan yang baik yaitu:

- a. *Government Effectiveness* ( $X_2$ ) adalah ukuran kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Diukur dengan menggunakan indeks.

- b. *Regulatory Quality* ( $X_3$ ) yaitu ukuran kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan kemampuan mempromosikan pengembangan sektor swasta. Diukur dengan menggunakan indeks.
- c. *Rule of Law* ( $X_4$ ) yaitu ukuran sejauh mana seseorang mematuhi aturan masyarakat dan menegakkan hukum. Diukur dengan menggunakan indeks.
- d. *Control of Corruption* ( $X_5$ ) yaitu ukuran sejauh mana kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan untuk melakukan tindakan korupsi. Diukur dengan menggunakan indeks.

### C. Model Penelitian

Model struktural yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN yaitu:

$$Y = \alpha + \alpha_1 TR_{it} + \alpha_2 GE_{it} + \alpha_3 RQ_{it} + \alpha_4 RL_{it} + \alpha_5 CC_{it} + e_{it}$$

Dimana:

Y	=	Pertumbuhan Ekonomi (%)
TR	=	<i>Tax Ratio</i> (%)
GE	=	<i>Government Effectiveness</i> (indeks)
RQ	=	<i>Regulatory Quality</i> (indeks)
RL	=	<i>Rule of Law</i> (indeks)
CC	=	<i>Control of Corruption</i> (indeks)
$\alpha_1$	=	Koefisien
$\alpha$	=	Intercept
i	=	Periode
t	=	Negara

## D. Uji Asumsi Klasik

Sebelum data diolah, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Beberapa asumsi klasik yang harus diuji dalam model yang akan digunakan dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

### 1. Normalitas

Uji asumsi normalitas untuk melihat apakah *error term* terdistribusi secara normal atau tidak. Jika asumsi normalitas tidak dipenuhi maka prosedur pengujian dengan uji *t-statistic* menjadi tidak sah. Pengujian asumsi normalitas dapat dilakukan dengan uji *Jarque-Bera* atau dengan melihat plot dari sisaan. Hipotesis dalam pengujian normalitas adalah:

$H_0$  : Residual terdistribusi normal

$H_1$  : Residual tidak terdistribusi normal

Penolakan  $H_0$  dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas *Jarque-Bera* dengan taraf nyata  $\alpha$  sebesar 0.05. Jika probabilitas *Jarque-Bera*  $> \alpha$  maka dapat dikatakan tidak cukup bukti untuk menolak  $H_0$  yang artinya residual terdistribusi normal.

### 2. Multikolinearitas

Uji asumsi multikolinearitas dilakukan untuk memastikan model terbebas dari masalah multikolinearitas. Suatu model yang terbebas dari multikolinearitas

berarti tidak ada hubungan linear antar variabel bebasnya (independen). Gujarati (2006) menyatakan bahwa multikolinearitas dapat terlihat melalui:

- Nilai *R-squared* yang tinggi tetapi sedikit rasio yang signifikan.
- Korelasi berpasangan yang tinggi antar variabel bebasnya.
- Melakukan regresi tambahan dengan memberlakukan variabel independen sebagai salah satu variabel dependen dan variabel independen lainnya tetap diberlakukan sebagai variabel independen.

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai koefisien korelasi antara peubah bebas dalam model. Jika nilai masing-masing koefisien korelasinya lebih besar dari *rule of thumb* (0.8) maka model tersebut mengandung multikolinearitas.

### 3. Heteroskedastisitas

Suatu model yang terbebas dari heteroskedastisitas berarti variansi dari *error* bersifat konstan (tetap) atau dapat dikatakan homoskedastis. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan uji *White*. Model dikatakan mengandung heteroskedastisitas jika statistik *white* ( $n \times R^2$ ) lebih besar dari  $\chi^2$  tabel. Cara lainnya adalah dengan menggunakan metode *GLS Weight Cross-section* yang tersedia dalam estimasi output program *EViews 8*. Nilai *Sum Square Resid (SSR) Weighted* dibandingkan dengan *Sum Square Resid (SSR) Unweighted*. Jika  $SSR\ weighted < SSR\ Unweighted$  maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

#### 4. Autokorelasi

Suatu model yang terbebas dari autokorelasi terjadi jika antara pengamatan yang satu dengan pengamatan lainnya tidak ada keterkaitan atau saling bebas (independen). Komponen *error*  $\varepsilon_i$  yang berkaitan dengan data pengamatan ke- $i$  tidak dipengaruhi oleh  $\varepsilon_j$  yang berhubungan dengan data pengamatan ke- $j$ . Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan berikut:

$$\text{Cov}(\varepsilon_i \varepsilon_j) = E(\varepsilon_i \varepsilon_j) = 0 ; i \neq j$$

Salah satu uji untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson*. Nilai statistik *Durbin-Watson* (DW) yang hasilnya diperoleh dalam program *EViews 8* dibandingkan dengan nilai DW tabel. Model dikatakan terbebas dari autokorelasi apabila nilai statistik *Durbin-Watson* berada pada area non-autokorelasi. Penentuan area tersebut dibantu dengan nilai tabel  $D_L$  dan  $D_U$ . Dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak terdapat autokorelasi

$H_1$  : Terdapat autokorelasi

**Tabel 8. Nilai Durbin-Watson**

Nilai Durbin-Watson	Keputusan
$0 < x < D_L$	Autokorelasi positif
$D_L \leq x \leq D_U$	Tidak ada keputusan
$D_U < x < 4 - D_U$	Tidak ada autokorelasi
$4 - D_U \leq x \leq 4 - D_L$	Tidak ada keputusan
$4 - D_L < x < 4$	Autokorelasi negatif

### E. Metode Analisis Data Panel

Data panel menurut Gujarati (2003) merupakan suatu data *cross section* (individu/sektor) yang disusun berdasarkan runtun waktu (*time series*). Menurut Baltagi dalam Firdaus 2011, beberapa keuntungan menggunakan data panel sebagai berikut :

1. Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model (*unobserved individual heterogeneity*).
2. Data panel mampu mengurangi kolinearitas antar variabel.
3. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu karena unit data lebih banyak.

Terdapat beberapa metode yang sesuai dengan asumsi pada struktur *varians-covarians* yaitu struktur homoskedastik dan ada *cross sectional correlation* (*Seemingly Uncorrelated Regression / SUR*) dan asumsi adanya autokorelasi antar waktu pada *error term*. Jika memilih *cross-sectional SUR*, *Eviews* memperkirakan spesifikasi GLS yang layak yang mengoreksi heteroskedastisitas dan korelasi kontemporer. Demikian pula, bobot periode memungkinkan untuk heteroskedastisitas periode, sedangkan periode SUR mengoreksi heteroskedastisitas dan korelasi pengamatan umum dalam *cross-section*. Spesifikasi SUR adalah contoh dari apa yang terkadang disebut sebagai *Parks Estimator* (*Eviews Help*).

Terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan model data panel, yaitu:

### 1. Metode *Pooled Least Square* (PLS)

Pendekatan *Pooled Least Square* ini menggunakan metode OLS biasa. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana yang memiliki intersep dan *slope* yang konstan. Model *Pooled Least Square* dapat didefinisikan ke dalam model berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + X_{it}\beta_i + u_{it}$$

Dimana  $i$  merupakan negara yang diobservasi pada data *cross-section*, merupakan periode pada data *time-series*. Pendekatan ini memiliki keterbatasan karena diasumsikan intersep dan *slope* dari setiap variabel dinyatakan konstan untuk setiap negara yang diobservasi.

### 2. Metode *Fixed Effect* (FEM)

Pada metode *Fixed Effect Model*, intersep dapat dibedakan antar individu karena setiap individu dianggap mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam membedakan intersepanya dapat digunakan peubah *dummy*, sehingga metode ini juga dikenal dengan model *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Persamaan dalam model ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it}$$

Dimana  $\beta_{0i}$  merupakan intersep dan  $\beta_1, \beta_2$  merupakan *slope*. Adanya perbedaan intersep pada setiap unit *cross section* dilakukan dengan penambahan *subscript i*. Meskipun intersep berbeda antar negara namun intersep masing-masing negara tidak berbeda antar waktu, yang disebut *time invariant*.

### 3. Metode *Random Effect* (REM)

Pendekatan *Random Effect Model*, intersep tidak lagi dianggap konstan, melainkan dianggap sebagai peubah *random*. Nilai intersep dari masing-masing individu dapat dinyatakan sebagai:

$$\beta_{0i} = \beta_0 + e_i ; \text{ dengan } i = 1, 2, \dots, n$$

dimana  $e_i$  adalah sisaan acak (*error term*) dengan rata-rata = 0 dan ragam =  $\sigma^2$ .

Sehingga persamaan dalam model ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it} + u_i$$

### F. Metode Pemilihan Model (Uji Kesesuaian Model)

Untuk menentukan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian, maka dilakukan uji kesesuaian model melalui beberapa tahapan diantaranya:

#### 1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih teknik dengan metode *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect Model*. Pengujian ini dikenal dengan istilah uji *Chow* atau *Likelihood Test Ratio*.

Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \text{model } \textit{pooled least square}$$

$$H_1 : \text{model } \textit{fixed effect}$$

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol tersebut adalah dengan menggunakan *F-statistic* seperti dirumuskan oleh Chow (1967):



$$\text{Chow} = \frac{(\text{RRSS}-\text{URSS})/(\text{N}-1)}{\text{URSS}/(\text{NT}-\text{N}-\text{K})} \sim F_{\alpha}(\text{N}-1, \text{NT}-\text{N}-\text{K})$$

(Baltagi, 2005)

Dimana:

RRSS : *Restricted Residual Sum Square (Sum Square Residual Pooled Least Square)*

URSS : *Unrestricted Residual Sum Square (Sum Square Residual Fixed Effect Model)*

N : jumlah data *cross-section* (individu)

T : jumlah data *time-series* (periode waktu)

K : jumlah variabel independen

Dimana pengujian ini mengikuti *cross-section* F yaitu jika nilai *chi-square* pada tingkat signifikansi tertentu maka cukup bukti untuk tolak hipotesis nol ( $H_0$ ), yang berarti asumsi koefisien intersep dan *slope* konstan tidak berlaku, sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

## 2. Uji Hausman

Uji Hausman berperan dalam memilih model *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang lebih baik, dapat pula dilakukan pengujian terhadap asumsi ada atau tidaknya korelasi antara regresor dan efek individu. Untuk menguji asumsi ini dapat digunakan *Hausman Test*. Dalam uji ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : E(\tau_{x_{it}}) = 0$  ; maka *Random Effect Model* adalah model yang tepat,

$H_1 : E(\tau_{x_{it}}) \neq 0$  ; maka *Fixed Effect Model* adalah model yang tepat.

Sebagai dasar penolakan  $H_0$  maka digunakan statistik *Hausman* dan membandingkannya dengan *chi-square*. Statistik *Hausman* dirumuskan dengan:

$$H = (\beta_{\text{REM}} - \beta_{\text{FEM}})' (M_{\text{FEM}} - M_{\text{REM}})^{-1} (\beta_{\text{REM}} - \beta_{\text{FEM}})^2 \sim \chi^2(k)$$

(Baltagi, 2005)

Keterangan :

$\beta$  = vektor statistik

M = matriks kovarian

Jika nilai H hasil pengujian lebih besar dari *chi-square* ( $\chi^2$ ) tabel, maka sudah cukup bukti untuk tolak  $H_0$  sehingga model yang digunakan adalah model *Fixed Effect Model*, begitu pula sebaliknya.

### G. Uji Kriteria Statistik

Evaluasi model berdasarkan kriteria statistik dilakukan dengan beberapa pengujian antara lain sebagai berikut:

#### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dalam model dapat menjelaskan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Nilai tersebut menunjukkan seberapa dekat garis regresi yang diestimasi dengan data yang sesungguhnya. Nilai  $R^2$  terletak antara nol hingga satu. Semakin mendekati nilai satu maka model akan semakin baik.

#### 2. Uji F-statistik

Uji F-statistik digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen yang digunakan dalam penelitian secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-statistik yang besar lebih baik dibandingkan dengan

nilai F-statistik yang rendah. Nilai Prob (F-statistik) merupakan tingkat signifikansi marginal dari F-statistik. Dengan hipotesis pengujian sebagai berikut:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$$

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

(1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

(2) Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Jika  $H_0$  ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jika  $H_0$  diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

### 3. Uji t-statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan hipotesis pengujian sebagai berikut:

1.  $H_{0(1)}$  : Diduga *tax ratio* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN, sehingga hipotesis pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_{0(1)} : \beta_1 = 0$$

$$H_{a(1)} : \beta_1 > 0$$

2.  $H_{0(2)}$  : Diduga *government effectiveness* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN, sehingga hipotesis pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0(2) : \beta_2 = 0$$

$$H_a(2) : \beta_2 > 0$$

3.  $H_0(3)$  : Diduga *regulatory quality* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN, sehingga hipotesis pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0(3) : \beta_3 = 0$$

$$H_a(3) : \beta_3 > 0$$

4.  $H_0(4)$  : Diduga *rule of law* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN, sehingga hipotesis pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0(4) : \beta_4 = 0$$

$$H_a(4) : \beta_4 > 0$$

5.  $H_0(5)$  : Diduga *control of corruption* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN, sehingga hipotesis pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0(5) : \beta_5 = 0$$

$$H_a(5) : \beta_5 > 0$$

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji regresi dan analisis data mengenai pengaruh tata kelola pemerintahan dan *tax ratio* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax Ratio* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN yang menunjukkan jika *tax ratio* mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dan sebaliknya jika *tax ratio* mengalami penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan.
2. *Government Effectiveness* menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN yang menunjukkan jika *government effectiveness* mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, dan jika *government effectiveness* mengalami penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.
3. *Regulatory Quality* menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN yang menunjukkan jika *regulatory quality* mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, dan jika *regulatory quality* mengalami

penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

4. *Rule of Law* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN yang menunjukkan jika *rule of law* mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dan sebaliknya jika *rule of law* mengalami penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan.
5. *Control of Corruption* menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN yang menunjukkan jika *control of corruption* mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, dan jika *control of corruption* mengalami penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.
6. Ada 3 negara yang memiliki koefisien *fixed effect* bernilai negatif yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand sehingga pertumbuhan ekonominya bergantung kepada tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan ada 3 negara yang memiliki koefisien *fixed effect* bernilai positif yaitu Filipina, Indonesia, dan Kamboja yang pertumbuhan ekonominya bergantung kepada *tax ratio*. Oleh karena itu, tanpa adanya tata kelola pemerintahan seperti *government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption* maka sudah memiliki pajak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa *government effectiveness*, *regulatory quality*, dan *control of corruption* dapat di percepat dengan menegakkan aturan hukum, karena 6 negara ASEAN masih kurang menaati aturan hukum yang berlaku di negaranya masing-masing.
2. Hendaknya pemerintah mampu meningkatkan *rule of law* (aturan hukum) yang berlaku terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pembangunan ekonomi.
3. Pemerintah, para pelaku ekonomi, maupun seluruh lapisan masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran akan penyelenggaraan dan penegakan hukum yang berlaku sehingga dapat menciptakan *good governance*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud penegakan *rule of law* yang merupakan indikator kualitas pemerintahan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga pemerintah sebaiknya menurunkan *tax ratio* sehingga masyarakat tidak di bebankan dengan tingginya *tax ratio* disuatu negara sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- ADB. 1998. *Annual Report*. Manila. Asian Development Bank (ADB).
- Aidt, Toke, Jayasri Dutta dan Vania Sena. 2008. *Governance Regimes, Corruption and Growth: Theory and Evidence*. *Journal of Comparative Economics* 36 (2008) 195–220.
- Alam, Rafayet, Erick Kitenge, and Bizuayehu Bedane. 2017. *Government Effectiveness and Economic Growth*. *Economic Buletin*. Vol 37 issue 1.
- Amelia, Tisa. 2014. *Hubungan antara Tarif Pajak Penghasilan dan Penerimaan Pajak: Analisis Data Negara-Negara ASEAN 1987-2011*. Institut Pertanian Bogor.
- Arifiyadi, Teguh. (2008). *Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. September 10, 2009.
- Ademola Azeez. 2009. *Contesting Good Governance in Nigeria: Legitimacy and Accountability Perspectives*. *J Soc Sci*, 21(3): 217-224. Department of Political Science, University of Ilorin, Nigeria.
- Baltagi, Bagi (2005). *Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition*. John Wiley & Sons.
- Basu, Sudip Ranjan, 2002. *Does Governance Matter? Some Evidence from Indian States*. *Journal of VIIth Spring Meeting of Young Economists*. University of Geneva, Switzerland.
- Bayar, Yilmaz. 2016. *Public Governance And Economic Growth In The Transitional Economies Of The European Union*. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, No. 48 E/2016, pp. 5-18.
- Dewi, Putu Kartika dan Nyoman Triaryati. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Pajak terhadap Investasi Asing Langsung*. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 4, No. 4, 2015: 866-878.
- Djankov, S., McLiesh, C., Ramalho, R., 2006. *Regulation and Growth*. *Econ. Letters* 92 (3), 395–401.



- Dornbush R dan Fischer S. 1994. *Buku Ekonomi Pembangunan* : 649-651. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Dökmen, Gökhan. 2013. *Environmental Tax and Economic Growth : A Panel VAR Analysis*. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 40, Haziran-Aralık 2012 ss. 43-65.
- Furceri, Davide dan Georgios Karras. 2017. *Tax changes and economic growth: Empirical evidence for a panel of OECD countries*. OECD and University of Palermo.
- Gale, William dan Andrew Samwick. 2016. *Effects of Income Tax Changes on Economic Growth*. Brookings Institution and Tax Policy Center.
- Gupta, Abhijit Singh. 2007. *Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries*. IMF Working Papers. Working Paper No. 07/184
- Huang, Ching dan Nathaniel Frentz. 2014. *What Really Is the Evidence on Taxes and Growth?*. Center on Budget and Policy Priorities. 820 First Street NE, Suite 510. Washington, DC 20002.
- Huynh, Kim P. dan David T. Jacho-Chávez. 2009. *Growth and Governance: A Nonparametric Analysis*. Journal of Comparative Economics 37 ; 121–143.
- Ikhsan, Surya dan Amri Amir. 2016. *Analisis Struktur Pajak dan Faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak di Indonesia*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 4, April-Juni 2016 ISSN: 2338-4603.
- Jhingan ML, 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali, Press.
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi. 2005. “*Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004*”. World Bank Policy Research Working Paper No. 3630. Washington, D.C.
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi. 2010. *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*.
- Lumban Gaol, Marlina. 2016. *Pengaruh Good Governance terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Marselina, Tri Joko Prasetyo. 2017. *Pengaruh Efektivitas Pemerintah, Kepastian Hukum dan Pengendalian Korupsi terhadap Tingkat Ketaatan Pajak*. Artikel. Universitas Lampung.
- McEachern, William. 2001. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta. PT. Salemba Empat
- Nachrowi, D.N. dan H. Usman (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometrika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Robby. 2016. *Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): Sebuah Peluang Atau Ancaman*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- OECD. 1997. *Good Government Assessment Methodology, Organization Economic Cooperation and Development (OECD)*. Paris.
- Oktozuhri, Murni Dauly, Iskandar Syarief, dan Rujiman. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara ASEAN*. Jurnal MEPA Ekonomi.
- Ozpolat, Asli, Gulsum Gunbala Guven, Ferda Nakipoglu Ozsoy, dan Ayse Bahar. 2016. *Does Rule of Law Affect Economic Growth Positively?*. Research in World Economy Vol. 7, No. 1; 2016.
- Pasaribu, Rowland. *Tata Kelola Pemerintahan*. Hlm 397-400.
- Pradhan, Rudra P. dan G. S. Sanyal. 2011. *Good governance and Human Development: Evidence form Indian States*. Journal of Social and Development Science Vol. 1, No. 1, pp. 1-8.
- Purbadharmaja, Ida. 2010. *Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Good Governance terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali*. Disertasi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Resnick, Danielle dan Regine Birner. 2006. *Does Good Governance Contribute to Pro-Poor Growth? A Review of Thevidence from Cross-Country Studies*. DSGD Discussion Paper No. 30.
- Riyad, Mohammad. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Enam Negara ASEAN tahun 1990-2009*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Rivera – Batiz, Fransisco L. 2007. *How Do Migrant from Latin America and the Carribean Fare in the US Labor Market?*. World Economy. 30(9) : 1399-1429.

- Road, Wilsa. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Singapura*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Romer, P. 1990. *Endogenous Technical Change*. *Journal of Political Economy*. 98(5): S71-102.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Shira, Dezan. 2016. *An Introduction to Taxation in ASEAN*. ASEAN Briefing. Issue 3. May and June 2016.
- Tiede, Lydia. 2011. *The Rule of Law and Economic Growth: Where are We? World Development*. Vol. 39, No. 5, pp.: 673–685.
- UNDP (2008). *A Users' Guide to Measuring Corruption*. <http://www.globalintegrity.org/information/books>.
- Wibowo, Danny. 2015. *Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Economic Growth Rate, Economic Structure, dan Tax Rate Terhadap Tax Ratio Pada Negara-Negara OECD dan Indonesia*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Wibowo, Edy. 2013. *Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Widodo, Tri. 2014. *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta.
- Yong, Ong Keng. 2005. *The Role of Good Governance in ASEAN*. ASEAN-EC Regional Symposium. Bandar Seri Begawan, 28 November 2005.
- <https://www.mcc.gov/> diakses pada tanggal 20 September 2017.
- <http://www.wisegeek.org/what-is-keynesian-economics.htm> diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.
- <http://www.worldbank.org> diakses pada tanggal 20 September 2017.
- [https://en.wikipedia.org/World\\_Governance\\_Index](https://en.wikipedia.org/World_Governance_Index) diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.